



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN GUBERNUR BABEL, DIRJEN GAKKUM KLHK,
DIRJEN PSDKP KKP, DIRJEN PRL KKP, BUPATI BANGKA,
DAN BUPATI BANGKA BARAT**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II (dua)
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 3 Desember 2020
Waktu	: 10.00 s.d. 13.10 WIB
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai Permasalahan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Penambangan Illegal dan Operasional Kapal Isap Pasir yang Berdampak kepada Nelayan.
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy/Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 32 orang 54 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 11 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Ir. Effendi Sianipar 4. Ono Surono, S.T. 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 6. Vita Ervina, S.E. 7. Drs. I Made Urip, M.Si.

8. H. Yadi Sri Mulyadi
9. Dr. Sutrisno, S.E., M.Si.
10. Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.
11. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

4 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H./ Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. Ir. Ichsan Firdaus
4. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

5 dari 6 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Sumail Abdullah
4. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess., M.Sc.
5. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

1 dari 6 orang Anggota

1. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

3 dari 5 orang Anggota

1. H. Muhtarom, S.Sos.
2. Luluk Nurhamidah, M.Si.
3. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

3 dari 5 orang Anggota

1. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
2. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
3. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

2 dari 5 orang Anggota

4. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
5. Drs. Hamid Noor Yasin, M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

1 dari 4 orang Anggota

1. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul, S.Sy.

2. Ema Umiyatul Chusnah

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. H. Erzaldi Rosman, S.E., M.M. (Gubernur Kepulauan Bangka Belitung);
2. Syahbudin, S.IP. (Wakil Bupati Bangka);
3. Drs. H. Sahirman (Pjs. Bupati Bangka Barat);
4. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
5. Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. (Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sekaligus Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Bismillahirrahmanirahim.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI baik yang hadir fisik maupun virtual,

Yang saya hormati Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,

Yang saya hormati Bupati Bangka,

Yang saya hormati Bupati Bangka Barat,

Yang saya hormati Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Yang saya hormati Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini dua jabatan oleh satu orang sudah kebayang tunjangannya berapa, sehat Bapak ya, *alhamdulillah,*

Terima kasih Bapak atas kehadirannya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan memiliki semangat yang sama untuk terus bekerja melakukan pengelolaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan.

Mengawali rapat hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kita semua hari ini masih diberikan kesehatan kemudian energi yang cukup serta semangat untuk senantiasa mensyukuri apa yang dia berikan dengan cara melakukan pengelolaan sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Dan kita bisa berkumpul dalam Rapat Dengar Pendapat pada pagi hari ini.

Sesuai dengan jadwal rapat DPR RI, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Oktober 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 10 November 2020, pada hari ini Kamis 3 Desember 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, Bupati Bangka Barat, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas tindak lanjut kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung mengenai permasalahan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan ilegal dan operasional kapal isap pasir yang berdampak kepada nelayan.

Jadi beberapa hari yang lalu kita bersama-sama berkunjung kesana. Saya termasuk orang yang sangat memiliki konsen terhadap keseimbangan manusia antara alam dan lingkungan. Karena dalam prinsip-prinsip yang saya miliki bahwa seberapa pun kemampuan ekonomi yang kita miliki, seberapa pun uang yang kita punyai tetapi kalau lingkungan sudah tidak seimbang, maka semuanya tidak akan ada makna. Karena kesejahteraan hidup manusia itu adalah keseimbangan antara diri, alam dan lingkungannya. Dan kita paham bahwa ketika bertemu dengan para nelayan mereka tidak bisa melaut, karena jarak antara kapal isap dengan areal dimana dia mencari ikan sangat dekat dan pasti kapal isap itu memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Terumbu karang menjadi rusak, kemudian juga beberapa spesies ikan sudah mulai ada yang mati. Kemudian daya jangkauan mereka untuk ketengah saya lihat kemampuan kapalnya sangat terbatas, sehingga mereka perlu mendapat perlindungan oleh kita semua. Kompensasi yang diterima menurut saya tidak bisa lingkungan dikompensasi dengan uang. Karena apa? Karena kompensasi hari ini atau kita dapat insentif hari ini hanya untuk bertahan dua tahun, tiga tahun, tapi bagaimana nasib mereka kedepan.

Inilah yang menjadi konsen kita sehingga konsen itu bisa kita wujudkan dalam dua hal misalnya ketika berkunjung ke Pulau Komodo kita berharap para nelayan local disana kalau ada perubahan-perubahan dan bgai hasilnya harus menjadi dana bagi hasil bagi mereka, sehingga areal mereka untuk berusaha walaupun sudah semakin sempit tetapi kesejahteraan hidupnya

negara memberikan jaminan. Nah, ini juga akan menjadi fokus kita dan nanti kita akan minta penjelasan-penjelasan untuk bersama-sama mengambil langkah yang tepat sehingga investasi berjalan tetapi masyarakat harus tetap terjaga keseimbangan lingkungannya dan terjaga kemampuan mereka untuk berusaha dalam setiap waktu ini.

Dan kemudian nanti juga akan kita menghitung apakah kapal isap itu memiliki efek ekonomi yang kuat tidak, apakah biaya produksinya dengan hasil yang didapatnya bisa tinggi tidak net-nya. Kalau misalnya mepet apalagi rugi kan jadi ruginya berkali-kali. Sudah perusahaannya rugi, biaya operasionalnya besar, hasil yang didapat kecil, tapi kerusakan lingkungan sangat besar resikonya bagi kesinambungan. Ini fokus-fokus kita dan saya sampaikan ke Bapak Gubernur juga saya pikir juga masyarakat bisa jadi ada sisi maladministratifnya, tetapi semangat yang dimiliki untuk hidup dalam lingkungan yang nyaman, hidup dalam lingkungan yang layak, hidup dalam lingkungan yang tertata, kita pun kan tidak mungkin bisa hidup dalam satu tempat di mana ada bau busuk yang masuk ke hidung kita.

Nah, misalnya saya juga minta mohon dilakukan kordinasi bagaimana pun warga kita, yaitu warga Kenanga yang 6 orang sekarang ditahan hari ini menjalani proses peradilan pertama di Pengadilan Negeri dan satu orang pegawai kehutanan provinsi menjadi tersangka mulai kemarin. Mudah-mudahan ini juga tolong dikomunikasikan minimal saya menyampaikan tolong dibantu penangguhan penahanannya di tingkat Muspidanya. Karena bagaimana pun konsen warga seperti ini sangat diperlukan oleh negeri ini. Kalau semua warga sudah cuwek apalagi misalnya di daerah di tempat saya kerusakan lingkungan bisa ditukar dengan sembako atau tanda tangan dukungan Rp100 ribu, justru yang seperti ini akan merusak habitat lingkungan masyarakat bagi kepentingan bangsa kita dalam jangka panjang.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Rapat Dengar Pendapat hari ini dimulai pukul 10.00 WIB dan akan diakhiri pukul 13.00 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Kata Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Gubernur Bangak Belitung, Bupati Bangka, Bupati Bangka Barat, Dirjen Penegekan Hukum, Dirjen PSDKP, dan Dirjen PRL terhadap agenda rapat;
3. Tanggapan Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Gubernur Bangak Belitung, Bupati Bangka, Bupati Bangka Barat, Dirjen Penegekan Hukum, Dirjen PSDKP, dan Dirjen PRL;
5. Kesimpulan Rapat;
6. Penutup.

Ini disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Wilayah pesisir memiliki arti yang penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat nelayan. Wilayah pesisir dan laut yang masih lestari memiliki potensi perikanan yang melimpah, hal ini disebabkan karena rumah-rumah atau terumbu karang tempat ikan bertelur dan berkembang biak masih terjaga. Begitu pula dengan biota lainnya jika kelestarian perairan laut dapat terus terjaga dan dikelola secara berkelanjutan dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir yang pada umumnya yang berprofesi sebagai nelayan secara umum dan turun menurun. Namun sebaliknya jika potensi pesisir perairan laut tidak dikelola secara berkelanjutan maka tidak akan menunjang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir atau nelayan secara turun menurun, karena potensi yang dimiliki akan habis atau punah, sehingga tidak akan lagi dinikmati oleh anak cucuk kita di masa yang akan datang.

Inilah sebenarnya yang menjadi fokus bahwa pembangunan pengelolaan ruang laut harus menjadi pengelolaan yang berkelanjutan. Kita ini bisa melihat fakta jangankan bicara anak cucu yang berkelanjutan, bicara kehidupan mereka hari ini saja sudah sangat berat. Ini yang menjadi bahan fokus kita, saya katakan bicara kepentingan hari ini saja sangat berat. Kita semua hari ini menjadi Anggota DPR RI ada batas waktunya, jadi Gubernur ada batas waktunya, jadi Menteri, jadi Dirjen ada batas waktunya. Seluruh batas waktu kekuasaan yang kita miliki jangan sampai suatu saat menjadi penyesalan kita karena kita tidak bisa menjaga tugas dan kewajiban kita sehingga suatu saat ketika jadi rakyat biasa kita main dipesisir rakyatnya sudah tidak bisa melaut, pesisirnya sudah habis, pasirnya habis, kemudian terumbu karangnya habis, mangrovenya habis dan orang menunjuk kepada kita ketika anda berkuasa saya mengalami derita seperti ini.

Saya boleh bercerita, saya tadi malam bertemu dengan beberapa tokoh. Ada sebuah daerah tidak usah saya sebutin, pada waktu memimpin Gubernurnya tidak konsen terhadap lingkungan. Dia mengizinkan pembangunan di beberapa wilayah bahkan di anak sacral sekali pun, karena ini sebuah daerah yang sangat sakral. Cerita tokoh itu adalah ketika meninggal tidak ada satu pun rakyat yang mau mengantar pemakamannya hanya diantar oleh kerabat. Sebuah pedihan yang akan dialami oleh siapa pun. Inilah barangkali pesan-pesan yang saya berikan kepada diri saya sendiri dan kita semua.

Selain menunjang perekonomian masyarakat perairan pesisir yang memiliki terumbu karang dan bebatuan laut yang masih dapat mencegah terjadinya abrasi karena saat gelombang besar melewati bebatuan laut atau terumbu karang, gelombang besar tersebut akan terpecah menjadi gelombang kecil yang menuju pantai. Beberapa waktu yang lalu terakhir terdapat kecenderungan beralihnya pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut yang tidak didasarkan pada alasan menjaga sumber daya alam yang kita miliki tersebut. Hal lain yang menjadi alasan penting adalah bahwa

sepanjang dua, tiga dasawarsa terakhir ini pengelolaan sumber daya alam di darat telah menimbulkan degradasi lahan, hutan dan air serta kerusakan lingkungan yang bermacam kelestariannya. Bukan mustahil apabila kedepan wilayah pesisir dan laut Indonesia juga akan mengalami nasib yang sama seperti di darat karena pengelolaannya kurang baik.

Kawan-kawan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan barangkali hari ini disibukkan oleh munculnya ular ke kampung-kampung mulai dari phyton sampai kobra. Kemudian turunnya harimau ke daerah industry, ke kampung-kampung, ke kebun sawit berkelahi dengan petani, masih mending, kenapa? Kalau harimau turun itu bisa ditangkap oleh BKPSDA kemudian dikirim lagi ke tengah hutan. Pertanyaannya adalah kalau penyu ke darat karena airnya sudah tidak bisa lagi ditempat hidup laik, lumba-lumba naik ke darat dan sudah tidak bisa hidup di laut kan tidak diselamatkan lagi, ini bedanya.

Jadi menurut saya ruang laut itu jauh lebih sensitive dibanding ruang darat, ini saya tegaskan sekali lagi. Ruang laut jauh lebih sensitive dibanding dengan ruang darat. Gejala-gejala ke arah sana sesungguhnya mulai nampak saat ini, kasus pengisapan pasir dalam rangka operasional penambangan timah di pesisir pantai matras dan penambangan pasir laut yang merupakan dampak penambangan timah di pesisir pantai Sungai Liat Kabupaten Bangka merupakan bukti-bukti yang dapat kita saksikan sebagai bentuk kerusakan lingkungan di wilayah pesisir laut.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada hari ini Komisi IV DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat yang merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI yang telah dilaksanakan tanggal 26 sampai 28 November 2020 yang merupakan rangkaian agenda Komisi IV DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR RI.

Beberapa masukan dan informasi serta temuan yang telah berhasil dihimpun saat melaksanakan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Adanya penolakan masyarakat atau nelayan terkait kegiatan operasional kapal isap pasir penambang timah di perairan Pantai Matras serta ditemukannya kegiatan penambangan timah illegal oleh masyarakat pendatang di ekosistem mangrove Pantai Matras Kabupaten Bangka.
2. Adanya indikasi sedimentasi pasir laut di Muara Sungai Air Kantung akibat kegiatan operasional penambangan timah oleh kapal isap pasir di pesisir Sungai Liat Kabupaten Bangka, sehingga menyebabkan terganggunya lalu lintas kapal nelayan.
3. Adanya aspirasi dari masyarakat nelayan terkait penolakan kegiatan operasional kapal isap pasir penambang timah di perairan Pantai Desa Belo Laut Kecamatan Muntok Bangka Barat.
4. Adanya permintaan masyarakat di Kelurahan Kenanga Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka untuk membebaskan 6 orang Ketua Rukun Tetangga atau RT yang ditangkap karena dituduh memalsukan

dokumen terkait gugatan perdata pidana dan ketentuan hukum lainnya atas dugaan pencemaran lingkungan oleh pabrik pengolahan ubi kasesa PT Bangka Asindo Asri.

5. Adanya permintaan masyarakat Kelurahan Sungai Liat Kabupaten Bangka untuk mengusut kasus pencemaran lingkungan oleh pabrik pengolah ubi kasesa PT Bangka Asindo Asri.

Selanjutnya dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat hari ini Komisi IV DPR RI mendapat penjelasan dari Pemerintah Daerah Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka Barat Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bahan dalam memberikan rekomendasi terbaik atas penyelesaian pencemaran lingkungan hidup akibat penambangan ilegal dan operasional kapal isap pasir yang berdampak kepada nelayan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Demikianlah pengantar rapat yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka, Bupati Bangka Barat, Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSDKP dan Dirjen PRL untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut di atas. Dan kita bisa melaksanakan tepat waktu jam 10.00 WIB ini.

Kami persilakan Pak.

Terima kasih.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG (Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.):

Bismilahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan kepada kami untuk acara di DPR RI.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI, Bapak Dedi dan para Anggota dan Wakil Pimpinan dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir di ruang ini maupun secara virtual,

Yang kami hormati Bapak Dirjen Gakkum, Bapak Dirjen Pengawasan Sumber Daya Alam dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Bapak dan Ibu sekalian para Bupati yang hadir pada hari ini.

Saya akan memberikan penjelasan berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi. Yang pertama berkenaan dengan penambangan oleh kapal hisap PT. Timah di kawasan Pantai Matras, perlu kami sampaikan disini pada saat RZWP3K dibahas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu bersama dengan DPRD itu sudah mengusulkan agar IUP yang di bawah 2 mill itu tidak ada Pak, semua harus

dicabut. Tetapi pada saat langkah pembahasan dipembahasan yang ke-32 final pembahasan itu 34 langkah itu di DKP dihadiri oleh seluruh stakeholder termasuk PT. Timah bahkan KPK kami undang disitu Pak, terjadilah perdebatan tarik menarik akhirnya diputuskan dengan berbagai pertimbangan, sekali pun berat bagi kami sebetulnya Pak. IUP PT. Timah yang di 2 mill ke bawah itu tetap diadakan dengan pertimbangan itu merupakan asset negara dan pencabutannya harus melalui DPR RI karena itu penetapannya pun atas persetujuan DPR RI dan perhitungan untung ruginya disampaikan dalam rapat tersebut. Singkat cerita batal tapi ada yang menggembirakan bagi kami bahwa IUP itu hanya sampai 2025 habis. Tetapi Pak, sejenak RZBP3K kami tandatangani 6 bulan setelah RZBP3K ditandatangani keluarlah Undang-Undang Pertambangan. Nah, ini lebih dasyat lagi Pak. Jadi tidak usah berpanjang lebar saya Undang-Undang Pertambangan ini, mungkin tidak perlu saya jelaskan ini lebih merugikan lagi daerah kami, karena bisa saja di tahun 2025 itu IUP ini akan diperpanjang lagi. Dan pasal yang membuat kami lemah adalah apapun tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama itu sudah ada IUP-nya tata ruang tersebut gugur, jadi tambangnya didahulukan Pak.

Jujur Pak, saya selaku Pimpinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jajaran kami sebetulnya sedih melihat daerah kami hancur lebur bahkan biaya untuk merehabilitasinya pun ini tidak mampu lagi, tidak ada duitnya. Dan ini sudah saya buktikan pada saat saya di Bupati Bangka Tengah, ketika banjir melanda Bangka Tengah kerugian rusak infrastrukturnya itu kurang lebih sekitar hampir 400 miliar. Pusat hanya membantu 20 miliar saja, provinsi hanya membantu 25 miliar, kemampuan kami hanya 40 miliar, selebihnya sampai sekarang secara bertahap dibangun, dikembalikan dan belum selesai. Ini akibat daripada eks tambang PT. Kobatin yang sekarang pun belum ditegaskan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI apa statusnya dan sekarang menjadi lahan pencurian orang yang tidak bertanggungjawab diambil timahnya dan entah dijual kemana kami tidak tahu.

Jadi Pak, mengenai Matras dan sekitarnya, Bangka Belitung ini semua bermasalah. Karena masyarakat hampir tidak percaya lagi dengan PT. Timah, ada kompensasi tetapi diingkari atau pada saat kompensasi bukan kepada orang yang sebenarnya berkompensasi. Kalau dulu-dulu PT. Timah hanya menyerahkan ini kepada mitranya saja sehingga PT. Timah tinggal memerintahkan saja. Jadi PT. Timah tidak melakukan sosialisasi tetapi yang banyak sosialisasinya adalah mitra, tetapi khusus Matras ini mulai ada perubahan Pak. Di sini sosialisasinya melibatkan semua seluruh *stake holder* tapi sebelum-sebelumnya sudah diadakan sosialisasikan, entah kapan tetapi nelayan tidak diikutsertakan. Jadi karena PT. Timah menganggap ini sudah ada sosialisasi mereka jalan.

Dan mohon maaf Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, bahwa Pemerintah Provinsi disini tidak memiliki kewenangan untuk mencabut itu Pak. Menyetop pun tidak, kami salah Pak, tetapi sebagai tanggungjawan kami kepada masyarakat masa sih iya Pemerintah Daerah tidak berbuat apa-apa terhadap masyarakatnya, itu sudah kami lakukan Pak, dengan memanggil pertemuan dan bahkan kami melakukan operasi

penertiban bersama Kepolisian kepada lokasi-lokasi di mana IUP Timah yang dikerjakan. Kadang-kadang IUP-nya sampai kordinat X, Y tetapi dia keluar inikan repot Pak. Nah, mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, puncaknya mental Pol PP kami jadi rusak gara-gara pada tahun yang lalu itu tepatnya bulan November di Belitung kami Pol PP bersama Pak Wagub kebetulan turun langsung tersandrakan asset kami 8 mobil hangus terbakar dan Bapak Wagub kami disandrakan baru datang Kepolisian. Dan mohon maaf sekali lagi Pak, Pol PP kami menjadi tersangka.

Jadi untuk yang sekarang-sekarang ini bukan kami tidak mau melakukan operasi penertiban. Ada pun kami lakukan operasi penertiban sudah tidak setegas yang lalu Pak, dan terus terang saja biaya operasi kami pun sudah habis sejak bulan Juli kemarin karena kami refocusing. Tetapi Pak, semangat kami ingin bersama-sama nelayan tetapi kalau misalnya dibalik kepada kami, susah juga kami karena tidak ada kewenangannya. Ditambah lagi mohon maaf Pak, PT. Timah ini 2 tahun berturut-turut rugi terus. Ngapain nambang, saya sependapat dengan Bapak. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat dilematis bagi kita Pak, untuk apa semakin rusak alam kita tapi rugi juga.

Hal ini mungkin harus lebih detail lagi Pak, kawan-kawan dari DPRD menelusup ke dalam, tapi maksud saya bukan hanya Komisi IV DPR RI tapi ada komisi yang menangani pertambangan harus ikut serta disini, kalau lingkungan hidup mungkin sudah Komisi ini Pak. Dan kami sangat berharap Pak, dukungan dari pusat sebetulnya untuk menertibkan ini. Nah, yang bisa kami lakukan penertiban Pak, bukan PT. Timahnya sebetulnya karena dia legal Pak, tetapi miyra-mitra PT. Timah, entah yang sengaja nakal atau nakalnya ditutup-tutupi oleh oknum PT. Timah. Nah, ini yang harusnya kita harus lakukan juga penertiban, karena mohon maaf Pak, ini kapal di laut hasil 1000, apakah kita yakin 1000-nya ke PT. Timah, Bapak sudah bisa jawab sendiri. Hal-hal begini kan sulit Pak, kita. Saya rasa itu untuk Matras dan sekitarnya.

Pulomas yang pasir, Pulomas ini terbit ijin pada waktu Bupati Bangka 3 periode sebelum beliau Pak. Maksud daripada ijin itu diberikan adalah bermaksud untuk menggali pasir tersebut agar alur kapal nelayan bisa masuk. Tetapi apa daya Pak, mungkin langkah pertamanya tidak sesuai dengan strategi apa yang dia lakukan, sehingga mungkin saking pasirnya tidak laku ditumpuklah dikiri-kananya sehingga gundukan kiri kanan tersebut terbeban sehingga kalau misalnya digali ya yang di atas turun lagi, dia harus digali lagi. Nah, tadinya kita akan provinsi karena sudah kewenangan provinsi akan menata itu, tetapi waktu habis ijin diteruskanlah oleh Bupati yang sekarang untuk diijinkan dengan pertimbangan kalau tidak digali nelayan tidak bisa masuk. Di satu sisi Bapak Bupati menolong nelayan disisi lain kami pun belum bisa menerbitkan ijin karena RZBP3K-nya belum. Nah, sekarang kami sedang mau menata Pak, kami lagi rekonsiliasi dengan Bupati Bangka, apa yang harus kita lakukan di sisi daratnya, karena itu kewenangan Kabupaten di sisi lautnya adalah kewenangan Provinsi. Ini mau kita kolaborasikan Pak, tetapi tidak bisa kita hentikan itu karena begitu berhenti pasir numpuk, nelayan tidak bisa masuk. Dan kebetulan Bapak Edhy Prabowo waktu itu

sudah berkunjung kesitu dan sekarang sedang didesain ada project-nya Pak, sedang didesain juga. Jadi nanti desain yang disampaikan oleh KP itu akan dikolaborasikan dengan kami dan Pemerintah Kabupaten Bangka Pak. Ini penjelasan dari kami Pak.

Yang ketiga, Kenanga. Bau busuk ini Pak, memang dilematis ijin sudah dikeluarkan, tata ruangnya jelas, pihak dari Gakkum pun sudah datang disana, kadar udaranya ini setelah diperiksa dan sudah keluar hasil pemeriksaannya tidak diatas ambang bahaya masih ada toleransi disitu. Nanti dari ada toleransi itu kami tidak bisa melakukan itu, karena kan sudah diperiksa Pak, demikian. Kalau dari dukungan Pak, mohon maaf pengacara yang membela rakyat itu juga staf khusus kami, memang kami khusus memperhatikan itu. Iya Pak, pasti akan kami bantu penangguhannya Pak. Demikian Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Gubernur yang saya hormati.

Sebenarnya ngundang inikan untuk mencari solusi, saya ini orang yang tidak pernah formal Pak. Selama disana saya keliling naik taksi, naik grab, cerita rakyat terhadap Bapak marah Pak. Jadi pikiran rakyat itu tidak tahu kalau Bapak Gubernur sudah bertahan, kalau Bapak gubernur sudah bantu rakyat, pikiran masyarakat ini Bapak Gubernur ini kerja sama. Itukan suara mereka kan, dengan perusahaan Timah itu mereka yang kaya.

Nah, ini yang perlu dijelaskan kalau sudah dijelaskan seperti ini berarti kita harus melakukan secara bersama. Kalau Bapak operasi Pak, kita Komisi IV DPR RI siap dampingi. Nanti Gakkum siap dampingi, KKP siap dampingi, tidak ada ongkos DPR RI saya berangkat Pak, tenang saja. Nah, ini yang ingin dilakukan dan saya nanti berkunjung kepada Bapak, kemudian berkunjung sampaikan problemnya ini sehingga Bapak terjaga, karena punya komitmen kan seperti itu. Dan kita bersama-sama kalau ada sesuatu disini misalnya perlu dibicarakan dengan komisi lain ya kita ajak juga. Ini faktanya bahwa ketentuan itu memberikan kerugian yang besar bagi masyarakat. Dan persoalan dilapangan seringkali kita berhadapan dengan sesama kita itu juga fakta yang tidak bisa dihindari. Termasuk juga saya bingung juga kok itu kita waktu itu banyak sekali aparat yang menjemput kita tetapi yang illegal ada terus yang nambang mangrove itu, pasir itu. Kita juga bingung juga kok bisa begini.

Nah, selanjutnya sekarang dipersilakan Bupati dulu selesaikan dulu, Bupati Bangka.

Silakan.

WAKIL BUPATI BANGKA (SYAHBUDIN, S.IP.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swasti astu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Yang saya hormati Pimpinan Rapat beserta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang mulia,
Yang saya hormati Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan pagi hari ini,
Yang saya hormati Direktur Jenderal Penegakkan hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pak Roy. Saya sudah berapa kali berkunjung dengan beliau waktu penyerahan Adipura,
Yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh yang hadir di ruangan ini yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu per satu untuk mempersingkat waktu.

Seperti apa yang telah disampaikan dari awal oleh Bapak Gubernur dan juga penjelasan dari Pimpinan Rapat yang terhormat, bahwa itulah sebenarnya kondisi Kabupaten Bangka. Kalau boleh saya andaikan Pak, Kabupaten Bangka dengan segala permasalahannya ibaratkan benang basah, kusut adanya di kaki ayam Pak, ribet Pak. Karena kami yang berada di wilayah tersebut, saya sebagai Wakil Bupati Bangka mohon maaf pada kesempatan ini juga Bapak Bupati juga menyampaikan tidak dapat hadir secara fisik dalam kegiatan ini, beliau sangat berkeinginan karena ini masalah wilayah kami yang banyak disini persoalannya, tapi oleh karena ada hal yang tidak bisa diwakilkan untuk menghadiri suatu kegiatan beliau mendisposisikan kepada saya untuk hadir pada kesempatan hari yang berbahagia ini Pak.

Kami tentunya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan yang ada di Kabupaten Bangka, seperti tadi disampaikan masalah Matras, masalah pabrik ubi kasesa dan yang lain-lain masalah air kantung. Persis seperti apa yang disampaikan dan oleh Bapak Gubernur dan apa yang Bapak-bapak yang terhormat dari Komisi IV DPR RI mengamati dilapangan itulah adanya Kabupaten Bangka. Dan saya pikir ini tidak bisa kita selesaikan hanya dengan pertemuan pada hari ini Pak, perlu ada tindakan-tindakan yang lebih spesifik lagi dan kita untuk sama-sama seluruh yang mempunyai kepentingan dan perhatian terhadap negara ini untuk bisa menyelesaikannya.

Dan kemudian saya perlu sampaikan permasalahan timah, kapal isap, TI Apung yang ada di Kabupaten Bangka ini sudah kalau boleh saya katakan ini sejak jaman Nabi Adam sudah seperti ini carut marutnya. Dan kemudian yang masih teringat, yang masih ada dalam memori otak saya bahwa pada tahun 2019 kami dilantik September 2018, 2019 akhir bulan Desember saya telah mengamankan atau katakanlah menyelesaikan permasalahan sengketa

yang di tempat itu juga Pak, yang Bapak hadir kemarin di Matras itu antara pro dan kontra pada malam hari itu terjadi demonstrasi yang luar biasa dan *alhamdulillah* saya didampingi oleh Kapolres dapat menyelesaikan demo masyarakat pada malam hari itu yang justru saya sampaikan Pak, saya pertaruhkan nyawa saya karena saya tidak ingin bahwa ada pertumpahan darah di antara pro dan kontra dan aparat pada malam hari ini. Dan *alhamdulillah* pada malam hari itu juga 3 kapal isap bergeser dari titik lokasi penambangan yang ada sekarang ini dan lari ke Air Kantung. Dan ketika itu kita bisa netralisir amuk massa, amarah massa pada malam itu ini dan ini terulang lagi Pak. Saya masih ada videonya.

Nah, itulah saya katakan persoalannya Pak, saya bukan mau mengulang-ngulang tapi untuk memberikan ingatan kita yang lebih lagi seperti benang basah kusut Pak. Tapi kita tidak bisa menjadikan ini sebagai alasan bahwa ini tidak bisa dijelaskan pasti ada jalan keluar. Kalau kita ingin sama-sama untuk menyelesaikan ini agar timah itu kan sebenarnya rahmat yang diberikan Allah kepada kita semua, khususnya masyarakat Bangka dan seluruh negara kita Indonesia ini. Tapi bicara bagaimana kita mengelolanya tentunya ada kepentingan-kepentingan yang harus kita utamakan di atas kepentingan sekelompok yang kecil. Itu menjadi hal yang penting saya pikir untuk kita menjadi bahan pemikiran kita. Tapi terlepas dari itu karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi bahwa IUP PT. Timah sudah eksisting disitu dan RZBP3K-nya sudah mengacu kepada itu di wilayah pertambangan. Tetapi sekarang bagaimana supaya timah bisa kita ambil, kalau pun harus diambil kemudian masyarakat yang terdampak langsung sebagai nelayan itu bisa juga menikmati dari tangkapan mereka Pak. Maka menurut hemat saya kalau pun itu harus kita laksanakan kompensasi tidak harus kita berikan dalam bentuk uang kepada masyarakat, tetapi seperti yang telah disampaikan oleh Pimpinan Sidang tadi bahwa ketika operasi KIP itu berjalan masyarakat tidak bisa menangkap ikan di antara 0-12 mill laut karena itu menjadi wilayah operasi KIP. Nah, mereka harus bisa melaut lebih jauh.

Nah, oleh karena itu sebenarnya kompensasi itu lebih diarahkan kepada untuk menolong ekonomi yang lebih produktif kepada masyarakat nelayan. Misalkan kita PT. Timah bisa memberikan kompensasi dalam bentuk kapal yang lebih besar GT-nya sehingga mereka bisa membentuk kelompok dan bisa melaut mungkin di atas 12 mill laut. Sehingga PT. Timah pun kalau harus bisa untuk beroperasi tetapi nelayan kita juga bisa mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Itu salah satu saja saya pikir pemikiran saya.

Dan kemudian untuk Air Kantung, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kondisinya seperti itu Pak. Jangankan satu minggu, satu hari saja kalau itu alat berat tidak menggali, tidak mengeruk itu, ketika ombak datang dari tengah Pak, timbunan-timbunan pasir kapal hisab TI Apung dihantar oleh gelombang ke pinggir itu akan langsung menutup ditambah lagi gundukan pasir yang ada di tengah ini akan turun ketika air pasang dan kemudian air surut Pak, dia akan turun dan akan menutup lagi. Dan yang paling kena dampak itu kita Pak, Pemerintah Kabupaten Bangka masyarakat akan demo ke kita. Nah, ini menjadi persoalan bagi kami karena

kewenangannya ada juga di Provinsi untuk lautnya. Nah, oleh karena itu kami mempunyai solusi sebenarnya itu pasir harus kita pindahkan dari situ. Gundukan pasir kiri dan kanan harus kita pindahkan dari situ kemudian harus ada pemecah gelombang di depan sehingga pasir tidak dihantar oleh gelombang kedepan lagi sehingga nelayan tetap bisa masuk. Dan tentunya harus ada normalisasi alur tersebut lebih dahulu, sehingga ke depan saya pikir persoalan ini bisa kita selesaikan.

Dan kemudian juga hal yang menjadi permasalahan di Kabupaten Bangka yang mana kawasan Pantai Timur Sungai Liat kita untuk mengusulkan menjadi kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, ketika pasir diambil terus dan kemudian kegiatan penambangan berjalan terus talud ataupun pemecah gelombang yang telah kita buat selama ini yang kalau tidak salah 100 miliar lebih di Matras itu tergerus terus Pak, habis Pak, tergerus terus. Dan salah satu itu ada objek wisata Tong Aci yang dia itu juga sudah membuat talud pemecah gelombang itu sudah turun setengah meter kondisi sekarang.

Nah, inilah persoalan-persoalan yang ada yang tentunya memerlukan pemikiran dan tindak yang komprehensif dari kita semua agar paling tidak kita bisa menarik benang basahnya tadi sehingga tidak terlalu memberikan resiko terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Kabupaten Bangka yang lebih luas lagi. Saya pikir itu Pimpinan Sidang yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, akhirul kalam.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Kita ini melakukan sesuatu seperti sebuah pertunjukan badut. Perusahaannya rugi karena biaya operasionalnya lebih mahal plus subnya itu tidak jujur. Nelayan tidak bisa melaut, alam rusak, setiap hari kalau bisa laut harus diangkat oleh eskavator, biaya eskavator sebenarnya kalau dibanding dengan penangkapan ikan bisa jadi lebih mahal eskavator itu. Satu saja pertunjukan ini dilakukan karena cara berpikirnya terlalu melihat penghitungan-penghitungan ini sekian kubik itu sekian.

Nah, kemudian saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung tidak sendiri. Kalau Bapak Jakarta, Jakarta begini saya pikir di Jakarta masih banyak yang waras, diantaranya yang waras adalah Komisi IV DPR RI. Jadi kita akan bersama-sama melakukan advokasi pembelaan sampai kapan pun Pak. Dan satu hal di Indonesia apapun bisa dikalahkan oleh satu opini, ya kita sama-sama bentuk opini yang cerdas agar masyarakat ... (rekaman terputus) ... baik ketika operasi dan tidak mau kenal ketika

sudah berhenti. Ini karakter karena saya juga pernah jadi Bupati tahulah kayak gitu. Saya khawatir ketika sudah tidak operasi musibah terus terusan, pendapat nelayan sudah sulit diharapkan, pendapatan daerah dari pariwisata dan sejenisnya tidak bisa lagi didapat, kemudian bisa jadi pusat pun juga tidak peduli lagi gitu loh untuk membantu *recovery*. Nah, ini yang kekhawatiran kita nanti kita rumuskan itu di dalam kesimpulan.

Selanjutnya kami persilakan Bupati Bangka Barat, karena duduknya di sebelah barat.

BUPATI BANGKA BARAT (Drs. H. SAHIRMAN):

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua Komisi IV DPR RI dan seluruh Anggota,
Yang kami hormati Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dirjen Perikanan,
Bapak Bupati, Bapak-bapak hadirin yang berbahagia.

Bangka Barat ini konsentrasi sekarang ini dua Pak, pertama untuk covid karena hijau merah, hijau merah dan kita tetap perketat. Yang kedua, berkaitan dengan Pilkada karena termasuk daerah pemekaran dari 3 daerah itu termasuk Bangka Barat Pilkada. Sebelumnya sudah terjadi protes masyarakat berkaitan penambangan itu di Kecamatan Jebus. Dan upaya-upaya sudah kita lakukan rapat kordinasi antara desa, camat dengan juga PT. Timah waktu itu. Dan kami sudah mengeluarkan surat tanggal 30 September diteruskan kepada Bapak Gubernur untuk diteruskan pada PT. Timah, tembusan juga kepada PT. Timah supaya penambangan itu ditunda dulu sampai selesai Pilkada. Sebab kami khawatir nanti kalau terjadi kerusuhan bisa saja masyarakat ngambek tidak ikut milih, bisa saja tapi mungkin itu tidak kita inginkan.

Kemudian datang pula persoalan dari Belo Laut ya baru-baru ini, belum selesai itu datang pula persolan dari Belo Laut. Kami gambarkan bahwa dari 6 kecamatan ini memang keenam-enamnya ada penambangan. Penambangan laut itu ada 5, penambangan darat itu ada 1, otomatis penambangan laut ada nelayan disana, nelayan berdampak. Nah, karena itu dalam proses kami belum sempat rapat karena ini memang masih baru soal Belo Laut. Saya dengar informasi bahwa kapalnya belum nambang di Belo Luat, tapi akan nambang karena memang sudah ada ijin antara kapalnya masih di Blingu. Jadi permintaan kami supaya ditunda dulu sampai selesai Pilkada, setelah itu berunding lagi paling tidak kalau memang ijinnya masih tetap diberikan tolonglah dipikirkan nasib nelayan.

Memang kompensasi itu jangka pendek saja, jangka panjang lebih penting berkaitan dengan nelayan, dengan lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau pun tetap menambang tolong dipikirkan nasib para nelayan, paling tidak

mereka bisa memikirkan kampung tengahnya selama ada proses penambangan itu mereka tidak dirugikan.

Saya kira itu beberapa hal yang penting mungkin dari kami yang perlu kami sampaikan sebagai Pjs Bupati Bangka Barat. Bapak-Bapak yang berbahagia, mudah-mudahan yang kita lakukan ini ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih kami sudah diundang, sudah bisa menyampaikan informasi kondisi dari Bangka Barat.

Demikian Bapak yang perlu kami sampaikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak Bupati, Bapak Gubernur.

Jadi sebenarnya dari kerangka pembicaraan yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten sama-sama berkeberatan terhadap operasional penambangan yang dinilai menimbulkan kerusakan lingkungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang serta menghentikan kegiatan ekonomi rakyat terutama para nelayan. Dan memiliki tingkat resiko terhadap perubahan iklim, perubahan lingkungan yang berdampak kepada bencana berdasarkan pengalaman bahwa ketika terjadi bencana *recovery*-nya sangat mahal dan sumber anggaran *recovery* mengalami keterbatasan, ini jelas.

Nah, selanjutnya dipersilakan jadi semangatnya sudah sama, sama-sama mencintai rakyat karena siapa pun yang dipilih langsung pasti sikapnya seperti ini. Kalau tidak sikap seperti ini, itu namanya dablek tidak mungkin gitu loh. Nah, untuk selanjutnya silakan Pak Dirjen Gakkum. Nah, daerah sudah seperti ini tinggal Bapak yang di pusat seperti apa.

Terima kasih.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M.):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI Bapak Dedi dan Bapak Budi, Serta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang hadir dalam ruangan ini maupun menggunakan virtual.

Saya akan menjelaskan beberapa hal, mohon ijin Bapak Dedi untuk mengambil beberapa waktu berkaitan dengan presentasi saya termasuk juga

mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, berkaitan dengan data-data yang disampaikan oleh Gakkum, karena ini sangat penting Bapak Dedi.

Silakan slidenya, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi apa langkah-langkah yang harus kita lakukan berkaitan dengan upaya penanganan kegiatan penambangan, pengendalian sebenarnya pada kegiatan penambangan di Bangka Belitung ini. Kami melihat ada beberapa tipologi kegiatan berkaitan dengan penambangan, baik timah Bapak Dedi maupun pasir. Ada kegiatan tidak ada ijin atau illegal yang ada di darat maupun di laut. Ini terjadi kemarin saya lihat juga di muara ada terjadi, Bapak Dedi juga pergi ke beberapa tempat juga bisa melihat ini terjadi itu illegal Pak. Yang kedua adalah yang berijin, ada kegiatan perijin ada kegiatan tambang di darat maupun di laut, bisa menggunakan kapal, bisa pesisir maupun kapal keruk dulu. Sekarang saya tidak melihat lagi tapi mungkin juga masih ada kapal keruknya jarak agak jauh lagi dari pantai.

Kemudian ada pihak yang bermitra dengan yang berijin. Kalau kemarin kita lihat ada beberapa kapal isap itu kelihatan mereka mitra dari pemegang ijin, pemegang IUP yang ada disana. Dan dilakukan di darat maupun di laut juga. Dan juga ada orang-orang yang bekerja di luar wilayah ijin mereka, mereka berijin tetapi mereka bekerja diluar wilayah berijin mereka. Ada kasus misalnya kami ambil contoh waktu itu kejadian ada kegiatan di Belitung telah kami gugat Bapak Dedi, mereka sudah membayar kepada kami Rp35 miliar. Ini adalah kapal berkaitan dengan tambang pasir di Belitung Timur.

Kami melihat ada persoalan yang terjadi adalah kalau kasus-kasus tambang illegal ada banyak kasus yang kami tangani Bapak Dedi. Namun, hari ini kemarin kami dapatkan informasi yang sangat menyedihkan dalam upaya-upaya mengatasi persoalan ini. Ada satu kepala desa yang menghalangi-halangi kegiatan kami disana, dibebaskan oleh putusan Pengadilan Negeri yang ada di Kabupaten Bangka. Ini satu hal dan kami tidak akan pernah berhenti untuk berjuang untuk melakukan upaya-upaya melakukan penindakan terkait dengan kegiatan illegal ini.

Apa permasalahannya? Permasalahan kalau kami lihat ada kerusakan lingkungan, kita bisa melihat persoalan ini. Dan ini sangat fatal sekali kalau kita mesti melakukan rehabilitasi. Yang kedua adalah konflik ruang per kelompok, kemarin kita bisa lihat Bapak Dedi bagaimana ada nelayan kemudian juga ada pihak-pihak mendapatkan ijin dan mereka berada dalam satu ruang yang sama. Tentu dalam konteks ini siapa pemilik kekuasaan, pemilik *power* akan menguasai ruang-ruang itu. Inilah persoalan yang terjadi di Bangka Belitung.

Kemudian kerugian masyarakat dan negara akibat kerusakan lingkungan ini. Ini banyak sekali Pak, masyarakat yang rugi, peningkatan bencana dan sebagainya terjadi di Bangka Belitung ini. Bahkan banyak sekali kegiatan-kegiatan ini yang meninggal dunia Pak, banyak. Mungkin kegiatan tambang yang paling banyak meninggal dunia di Bangka Belitung. Kemudian kerugian negara akibat kehilangan PNBPN dan pajak. Kami melihat ini adalah

tipologi dan permasalahan yang ada di Bangka Belitung yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan ini.

Slide selanjutnya, ini kita bisa lihat mungkin dari teman-teman mohon ijin saya membuka masker. Ini salah satu contoh kapal isap Pak, kemarin kita ambil dari drone, 3 tahun kita ada disana, kan bisa dilihat bagaimana dampak di sekitar yang terjadi di lokasi tersebut. Ini tentu harus menjadi perhatian kita bersama-sama bagaimana kegiatan penambangan ini bisa dilakukan tetapi juga dampak lingkungan kita bisa meminimalisir. Dan juga masyarakat bisa hidup di dalam kegiatan-kegiatan mereka yang selama ini mereka bisa hidup, namun dengan adanya konflik ruang ini juga akan mempengaruhi kehidupan mereka kiranya sekarang dan juga di masa yang akan datang.

Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan. Kami ingin sampaikan contoh sebenarnya, ada beberapa mandat kewenangan yang dimiliki, yang dimiliki oleh kementerian maupun Pemerintah Daerah, baik Gubernur maupun Bupati. Kami memiliki kewenangan-kewenangan oleh Undang-Undang, kita dalam konteks Undang-Undang Lingkungan ya kita mempunyai ijin lingkungan hidup. Dan juga harus mereka memiliki ijin damping kalau mereka melakukan pembuangan limbah mereka ke laut. Undang-Undang berkaitan dengan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini juga satu kewenangan kita dalam mengendalikan, sekarang bagaimana sejauhmana ijin lingkungannya, ijin dampingnya, termasuk ijin pinjam pakai kalau berada di kawasan hutan, di darat dan ijin usaha pertambangan.

Jadi alat-alat pengendali ini sudah ada sebenarnya, sekarang seberapa komitmen kita untuk menerapkan alat-alat pengendali yang ada ini agar kegiatan penambangan ini bisa berjalan secara berkelanjutan dan masyarakat juga bisa hidup dengan berdampingan di dalam kegiatan-kegiatan ini. Kemudian kami mohon ijin Pak, dalam konteks pertambangan ini kami mengambil contoh ada ijin dari Gubernur Pak Dedi, ijin lingkungan dari Gubernur sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 Pak. Kita pahami Pak, pemberi ijin itu wajib melakukan pengawasan. Kemudian kalau wajin melakukan pengawasan kemudian ditemukan pelanggaran pemberi ijin wajib melakukan penindakan. Kewenangan untuk lingkungan itu adanya di Pak Gubernur, karena beliau memberikan ijin. Saya ingin menyampaikan ini Pak, biar dipahami sama kita. Kalau ijin IUP memang di Kementerian tapi kan semua berawal di ijin lingkungan. Jadi ijin lingkungan ini ada, ini harus dipahami, harusnya ijin-ijin ini dilakukan pengawasan. Kami sedang mengumpulkan ijin-ijin semua Pak, kami akan pelajari semuanya, karena ini kewenangan Pemerintah Daerah harusnya mempelajari semua ini kemudian mengambil langkah-langkah bagaimana memastikan kegiatan-kegiatan yang itu sesuai dengan ijin lingkungannya dan kegiatan-kegiatan yang ada itu bisa mengendalikan dampak-dampak yang terjadi. Karena dalam ijin itu kan jelas Pak, ini yang harus dipahami bersama-sama.

Saya sengaja menyampaikan ini di tempat ini karena diminta oleh Komisi IV DPR RI untuk menjelaskan semuanya langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan dan mengendalikan kegiatan-

kegiatan pertambangan di Bangka Belitung ini. Jadi ada 11 kalau tidak salah ini ijinnya, ini kami dapatkan Pak, kami akan dalam kembali. Jadi kalau dibidang tidak ada kewenangan, ada kewenangan untuk itu. Saya ingin sampaikan kembali.

KETUA RAPAT:

Begini Pak, sebentar nanti diterusin, ini psikologi Pak. Ada kewenangan tapi bisa jadi karena merasa ini Pemerintah yang lebih tinggi berkepentingan, otoritas itu seolah-olah tidak nampak. Sehingga kalau Bapak tegaskan hari ini yang punya otoritas di Pemerintah Pusat seperti itu mungkin nyalinya juga nanti keluar. Ini urusan nyali Pak, jadi urusan nyali, biasalah Lurah kalau berhadapan dengan Bupati juga nyalinya kecil. Nah, sekarang statement Bapak, ucapan Bapak, membuat Bapak Gubernur nyalinya kembali membara. Itu saja Pak.

DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Bapak Dedi.

Mungkin kita bisa lihat lagi apa mandat yang didapatkan oleh Undang-Undang, diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kabupaten Kota.

Slide selanjutnya, saya melihat ini Pak. Jadi ini sangat jelas bahwa dalam konteks pertambangan yang ada di laut itu mereka harus punya ijin lingkungan. Saya bicara ijinnya lingkungan Pak, kalau nanti pertambangan kemudian juga berkaitan dengan laut itu nanti teman-teman KKP atau teman-teman Minerba, saya fokus di konteks Undang-Undang Lingkungan. Walaupun saya, banyak sekali Undang-Undang yang bisa dilakukan untuk mengendalikan dampak kegiatan pertambangan ini. Sekarang ini Pak, setiap usaha dan kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL, wajib memiliki ijin lingkungan, kan tadi sudah jelas ijin lingkungan sudah diberikan. Termasuk didalamnya kami sedang pelajari apakah ada ijin dampingnya, karena mereka membuang limbah ke laut. Bapak bisa lihat tadi gambar di dalam gambarf drone tadikan menyebar itu semuanya.

Kemudian juga pengawasan dan sanksi administratifnya Pak Dedi, ini jelas di Pasal 71 Ayat (1) "Menteri, Gubernur dan/atau Bupati, Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup". Dalam hal ini karena memberikan ijin maka siapa yang memberikan ijin harus melakukan pengawasan tersebut. Menteri bisa melakukan *second line* kalau tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan menimbulkan masalah yang serius, ini yang perlu disampaikan. Di samping kewenangan untuk melakukan pengawasan, dia juga punya kewenangan untuk melakukan perdata, instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup berwenang

mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Kami sudah melakukan untuk kasus yang di Bangka Belitung, di Indonesia banyak yang banyak kami lakukan. Kami ambil contoh untuk pertambangan, itu ada tambang pasir di Belitung yang sudah inkrah mereka sudah membayar ganti rugi.

Kami juga pernah melakukan penyelesaian sengketa beberapa kasus di Bangka Belitung. Ada kapal yang menabrak karang, dua kapal menabrak karang Pak, tidak besar luas wilayah karang yang dirusaknyanya. Di mana mereka membayar ganti rugi kepada negara 2,6 juta Dolar. Kami lakukan proses itu bersama-sama dengan teman-teman KKP. Jadi ini yang ingin saya jelaskan tentu di samping perdata juga pidana. Jadi ada kewenangan pidana juga, penegakan hukum pidana kalau ada tindakan-tindakan pidana yang terjadi di lokasi tersebut.

Terus selanjutnya, ini ada Undang-Undang lain Pak Dedi. Tadi saya hanya fokus kepada Undang-Undang Lingkungan bisa lihat Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga memberikan ruang yang sama. Kemudian terus Cipta Kerja terkait dengan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, termasuk juga Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba sangat keras berkaitan dengan kegiatan tanpa ijin dengan ancaman hukuman itu kalau Undang-Undang Minerba itu bisa mencapai pidana 5 tahun tapi juga pidana itu wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil pidana bisa 10 tahun kalau Minerba itu pidananya 5 tahun tapi dendanya Rp100 miliar.

Jadi kalau kita melakukan upaya-upaya ini seharusnya kita bisa mengendalikan kegiatan pertambangan yang ada di Bangka Belitung. Kalau semua pihak menyadari kewenangan-kewenangan dan kewajiban yang mereka miliki bersama-sama. Silakan Pak, kita bisa lihat seperti ini. Jadi sebenarnya kalau sudah jelas Pak, apa kewenangan-kewenangan, Pemerintah Provinsi punya kewenangan, melakukan pengawasan dan perijinan yang diterbitkan oleh mereka. Bisa memberikan sanksi apabila tidak ada kepatuhan. Termasuk juga melakukan gugatan perdata maupun sengketa dan juga bisa melakukan penyidikan tindak pidana oleh PPNS Dinas itu baik yang dilakukan oleh Provinsi maupun Kabupaten Kota. Ini diberikan mandat oleh Undang-Undang.

Jadi kami melihat bahwa semua yang hadir disini memang mempunyai kewenangan untuk melakukan itu kalau seperti tadi disampaikan, kalau kita bersama-sama ingin menata bagaimana ataupun mengendalikan kegiatan pertambangan ini lebih baik di Bangka Belitung. Saya meyakini kegiatan pertambangan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan masyarakat dan juga masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan daripada tambang-tambang ini. Tapi harus kita lakukan dengan sangat-sangat serius Pak Dedi.

Terima kasih.

Kemudian Pak Dedi, saya ingatkan kembali para Pimpinan. Pak Darori selalu mengingatkan kepada saya, Pak Darori ini adalah Dirjen Penegakkan Hukumnya di KLHK cukup lama. Slidenya selanjutnya, kalau kami tidak melakukan pengawasan kami bisa dihukum, Pak Darori selalu mengingatkan. Dan ini tadi setiap pejabat berwenang dan dengan tidak sengaja melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha maka bisa dipidana Pak Dedi. Kita lihat siapa yang memberikan ijin lingkungan disini, dia wajib melakukan pengawasan itu. Termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja juga dijelaskan pasal ini. Kemudian apa tindak lanjutnya? Menurut saya Pak Dedi, tindaklanjut yang harus kita lakukan adalah dua track Pak. Satu track adalah penyelesaian konflik ruang antar pihak Pak, kita harus lakukan proses ini harus kita kaji konteks penyesuaian ruang, review ruang dan sebagainya.

Yang kedua, penggunaan teknologi ramah lingkungan Pak. Pada banyak kasus-kasus penambangan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ini harus kita coba pikirkan.

KETUA RAPAT:

Biayanya mahal nggak?

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Kita cek Pak.

KETUA RAPAT:

Yang sekarang saja dia ngaku rugi kalau beli yang baru lagi yang ramah lingkungan lebih rugi lagi.

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Mohon ijin karena teknologi karena hal-hal lain ruginya, karena beban hutang dan sebagainya itu lain mungkin wilayah saya untuk mengomentari itu. Perekonomian masyarakat yang disampaikan Bapak Bupati tadi, kita pikirkan ini bagaimana. Tapi kita juga perlu melakukan langkah-langkah bersama, seperti misalnya operasi penertiban yang ditindaklanjuti oleh penegakan hukum yang sangat serius untuk yang illegal. Pengawasan kepatuhan dilakukan intensif untuk yang berijin. Termasuk juga kalau memberikan sanksinya, begitu juga dengan mitra-mitranya dilakukan pengawasan Pak, ini harus kita lakukan. Dan untuk yang bekerja tanpa ijin tentu kita lakukan penertiban dan juga penerapan sanksi, menggugat secara perdata dan juga melakukan penerapan *multi door*. Karena disini ada teman-teman KKP mungkin kita bisa bersama-sama teman-teman KKP menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Kehutanan dan juga Undang-Undang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kami sudah berinteraksi dengan teman-teman KKP dalam beberapa kasus Pak, untuk melakukan penindakan ini.

Ini beberapa gambar-gambar mungkin teman-teman sudah pada melihat. Pak Dedi, saya ingin menyampaikan khusus saya mohon ijin Bapak Gubernur yang saya hormati, dan saya sangat hormati Bapak Gubernur tapi saya ingin mengklarifikasi satu hal Pak, saya mohon ijin. Bapak Gubernur tadi menyatakan berkaitan dengan kasus PT. BAA, data Gakkum menunjukkan tidak terjadinya pencemaran. Saya ingin mendapatkan informasi Bapak Gubernur, karena kami sampaikan data kami hal berbeda disampaikan Bapak Gubernur. Kami sedang melakukan proses penyidikan terhadap PT. BAA. PT. BAA ini merupakan perusahaan yang menurut kami sangat tidak kooperatif. Bupati Bangka sudah berapa kali mengirimkan surat sanksi tapi tidak diindahkan. Mereka sudah berjanji menandatangani akan mengurangi baunya, Pak Dedi kan datang kesana masih bau Pak?

Kemudian kami melakukan Pak, proses pengawasan ditolak oleh mereka. Kemudian kami juga dihalangi-halangi proses pengawasan kami. Termasuk tim kami Pak, dibuntutin orang-orang Pak, jadi menurut kami ini yang harus saya jelaskan diruangan ini. Karena pernyataan Bapak Gubernur tadi Pak, saya dengan sangat hormat Bapak Gubernur tapi saya harus menyampaikan ini karena ini disampaikan di ruang terbuka yang dibuka di ruang publik, bahwa seolah-olah data Gakkum itu menyatakan perusahaan itu tidak melewati baku mutunya, tidak mencemari. Data kami lain Pak, saya buka disini karena sedang proses penyidikan Pak. Jadi ini yang harus saya klarifikasi ini sangat penting bagi kita menyampaikan apa adanya di dalam ruang publik. Jadi kami mohon mungkin bisa dijelaskan darimana, siapa yang menyampaikan informasi memberikan data Gakkum ini. Saya sendiri baru dapat data itu dari teman-teman Gakkum Pak. Jadi itu Pak Dedi.

Terima kasih Pak Dedi.

Terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota yang kami hormati.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Iya, penyelidikan silakan terus berjalan dan Bapak Gubernur diminta untuk menyelamatkan pegawai dan rakyatnya yang hari ini menjalani proses peradilan dan satu statusnya sudah tersangka.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Pak, ijin bicara sebentar inginikan Pak.

KETUA RAPAT:

Nanti saja Pak, ada dialog setelah ini dan nantikan Bapak ada penjelasan.

Silakan Bapak Dirjen PSDKP.

PLT. DIRJEN PRL KKP (Dr. TB. HAERU RAHAYU, A.Pi., M.Sc.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua,
Shalom,
Om swasti astu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami muliakan dan banggakan,
Anggota Komisi IV DPR RI yang kamu muliakan dan banggakan pula,
Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Dirjen,
Ibu dan Bapak sekalian yang hadir secara fisik maupun *online*.

Pimpinan, mohon ijin apakah ininya tetap dipakai atau boleh dibuka?
Baik, takut salah. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya datang di dua kaki mohon ijin, satu sebagai Dirjen Pengawasan dan yang satunya sebagai Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut. Saya awali dulu dengan pengawasan, slidanya kalau bisa ditampilkan.

Bapak Pimpinan dan Ibu, Bapak sekalian.

Kami di KKP terkait dengan pengawasan, terkait dengan isu yang ada di Bangka Belitung. Saya mendapatkan laporan dari Bapak Ayub selaku Ketua Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia atau yang dikenal dengan LKPI di bulan Agustus tahun ini. Beliau memang sangat semangat bahkan kemarin saja masih telepon dan WA saya berulang kali. Dan saya katakan kepada beliau sabar Pak, pagi ini saya akan ada kegiatan atau rapat kordinasi yang dipimpin langsung oleh Komisi IV DPR RI.

Ibu dan Bapak sekalian.

Komplain atau laporan yang disampaikan oleh Bapak Ayub dan kawan-kawan ini terkait dengan normalisasi dan pengerukan limbah pasir dan pengangkutan pasir laut. Apa yang kami lakukan di Ditjen PSDKP telah melakukan kordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung. Kami coba cek Pak, PT. Pulomas Sentosa atau dikenal dengan istilah PS melakukan kegiatan berdasarkan ijin yang telah dikeluarkan oleh Bupati Bangka sejak tahun 2011 sampai tahun 2020. Kemudian perpanjangan ijinnya itu dengan SK Bupati ini di tahun 2020 sampai nanti di 2024. Lokasi pengerukannya tepatnya di Sungai Liat hingga Muara Sungai.

Kemudian PT. Seputih Makmur Bersama atau SMB telah mengajukan ijin kepada Bapak Gubernur untuk melakukan pengerukan dari Muara Sungai hingga ke arah laut. Saat ini telah mendapatkan persetujuan ijin usaha normalisasi dan seterusnya ini di tahun 2020. Konfirmasi terakhir yang kami dapatkan yang disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Ditjen PSDKP bahwa surat persetujuan ijin tersebut telah ditarik kembali karena pemberian ijin harus berkordinasi dengan lintas instansi. Ini yang kami dapatkan Pak Gubernur.

Lanjut, kemudian kami di Ditjen PSDKP melakukan rapat kordinasi mengundang juga Kementerian ESDM dan PT. Timah, kalau tidak salah tanggal 27 Oktober belum lama. Dan pada saat itu kami meminta kepada PT. Timah untuk melakukan 4 hal, yang pertama mengakomodir tuntutan masyarakat yang kontra terhadap penambangan terkait CSR dan kompensasi yang diberikan dengan melakukan pendataan terhadap nelayan yang benar-benar mendiami wilayah sekitar wilayah Matras.

Kemudian kami juga meminta meminimalisasi tingkat kekeruhan sebagai akibat dampak aktifitas penambangan. Kemudian melakukan restorasi dengan menanam kembali terumbu karang buatan terhadap lokasi bekas kegiatan penambangan. Kemudian kami juga menghimbau kepada PT. Timah untuk melakukan pertemuan berkala dengan kelompok masyarakat nelayan yang ada di sekitar kegiatan penambangan.

Lanjut, kemudian pada tanggal 13 November di bulan ini kami juga melakukan rapat kordinasi dengan KIP mitranya PT. Timah. Ada 4 hal yang pada saat itu kita diskusikan, yang pertama kami meminta untuk memetakan *fishing ground* yang ada di wilayah IUP PT. Timah Tbk. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung menindaklanjuti pertemuan dengan kelompok nelayan untuk menggali lebih dalam terkait tuntutan masyarakat nelayan, lingkungan hidup dan kerugiannya. Kemudian survey bersama tentang pencemaran dari kegiatan KIP terhadap usaha masyarakat, baik yang ada juga di wilayah atau di sekitar *fishing ground*. Kemudian setelah ruang *fishing ground* ini ditentukan kami sebetulnya sudah minta kepada PT. Timah tidak boleh memasuki wilayah *fishing ground* tersebut Pak Ketua. Kenapa? Supaya menghindari konflik dengan teman-teman yang ada di lapangan.

Kemudian lanjut, tanggal 18 dan 19 di bulan ini Ditjen PSDKP bersama-sama Lanal Bangka Belitung dan DKP Bangka Tengah kita menyepakati survey bersama bagaimana dampak pencemaran kegiatan KIP terhadap usaha masyarakat nelayan. Tadi saya pikir Bapak Dirjen juga sudah banyak menjelaskan. Kemudian hasil pemeriksaan di atas kapal pada saat itu pada tanggal 18 sampai tanggal 19, intinya adalah KIP yang melakukan kegiatan operasi penambangan benar melakukan kegiatan di wilayah dengan titik kordinat yang tepat dan sudah sesuai dengan zona penambangan seperti yang tertera pada Perda Zonasi Pemda Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020, memang betul ininya Pak Ketua.

Kemudian pada saat patroli terdapat 4 kapal yang berada di sekitar Matras, 2 KIP sedang tidak beroperasi dan 2 KIP lainnya sedang melakukan

kegiatan atau aktifitas. Akibat kegiatan penambangan oleh 2 kapal yang sedang beroperasi memang terdapat warna airnya menjadi sangat keruh, radiusnya 100 sampai 200 meter. Tetapi hasil informasi teman-teman dilapangan di atas 1 kilo ini relative masih bisa ditolerir.

Kemudian lanjut, operasi darat dan hasil dialog yang dilakukan oleh DKP Provinsi Bangka Belitung menyampaikan bahwa sebagian nelayan tidak ingin ada kegiatan penambangan. Kemudian pada kondisi cuaca aman untuk melakukan penangkapan ikan pihak PT. Timah diminta tidak melakukan kegiatan penambangan. Jadi pada musim-musim tangkap, musim baik cuacanya sebetulnya ada himbauan kepada PT. Timah untuk tidak melakukan kegiatan penambangan.

Kemudian di lokasi penambangan terdapat beberapa nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Terkait dengan CSR yang diberikan oleh PT. Timah dan kompensasi yang diberikan oleh KIP mitra PT. Timah diminta untuk pembagiannya dilakukan secara transparan dan akuntable. Kenapa demikian? Karena nampaknya juga banyak info yang simpang siur ini Pak Ketua Pimpinan. Ada yang katanya dapat, ada yang katanya juga tidak dapat, ini yang kami mendapatkan data dilapangan. Semua permasalahan terkait dengan temuan yang didapatkan dilapangan sudah kami sampaikan kepada PT. Timah Tbk.

Lanjut, kemudian tindaklanjut hasil kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI. Ditjen PSDKP kami instruksikan Satwas PSDKP wilayah Pangkal Balam untuk melakukan pengawasan di lokasi Perairan Matras sebagai lokasi penambangan pasir timah. Kemudian tanggal 2 kemarin kalau tidak salah kami juga mengutus perwakilan penyidik dari Ditjen Pengawasan, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Satwas PSDKPP Pangkal Balam untuk mendampingi tim penyidik KLH dengan Bapak Dirjen ini, mohon ijin kami juga sudah terjunkan tim. Ini yang kami dapatkan dari aspek pengawasan Pak Pimpinan dan Ibu, Bapak sekalian.

Selanjutnya mohon ijin saya coba dari aspek pengelolaan ruang lautnya. Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan isu pencemaran di wilayah Bangka Belitung ini. Bisa ditampilkan slidenya, apa yang tadi disampaikan oleh Pimpinan, kemudian oleh Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Dirjen dan kita semua. Tampaknya memang betul terjadi kondisi yang memang degradasi lingkungan dilapangan. Ini yang kami amati.

Kemudian yang ingin saya sampaikan, lanjut. Ini sekilas saja selama ini KKP banyak menerima pengaduan dari masyarakat. Lanjut, Pak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan kegiatan penambangan pasir atau timah di laut saya sebetulnya ingin menyampaikan atau meng-*highlight* yang point 4. Pada kawasan tangkapan ikan tradisional perusahaan pasir laut wajib memperhatikan kepentingan nelayan tradisional yang memanfaatkan kawasan tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Sebenarnya sudah ada ini signap-signal warning-nya yang seyogyanya dapat diikuti dengan baik oleh teman-teman di PT. Timah.

Lanjut, kemudian saya juga ingin menyampaikan perairan laut yang dilarang untuk kegiatan penambangan pasir ini ada 4. Saya pikir ini sudah sangat umum, satu di kawasan suaka alam, dua di kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian yang keempat di perairan dengan jarak kurang dari atau sama dengan 2 mill laut. Ini yang menjadi titik point ini Pak Ketua, kemudian yang keempat juga ini perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut yang terendah.

Ini sebetulnya kalau diikuti dengan baik *Insy Allah* mungkin dampaknya bisa juga diminimalisasi. Lanjut, kemudian kami di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut ini mendapat pengaduan yang sama tetapi topiknya berbeda yang disampaikan oleh Pak Ayub surat pengaduan LKPI ini tanggal 6 April tahun ini, tembusan kepada MKP. Isinya ini perihal permintaan bantuan keringanan dan perlindungan atas kasus hukum yang ditangkapnya 6 nelayan. Saya pikir kemarin sudah kita diskusikan dipimpin langsung oleh Ketua, ada Bapak Dirjen Gakkum juga ya. Kemudian ini pokok masalah yang diadakan terkait dengan konflik pemanfaatan ruang laut.

Kemudian tanggal 20 LKPI juga melakukan atau menyampaikan pengaduan kepada kami. Isinya ini perihal penolakan masyarakat nelayan pesisir terhadap kegiatan dan rencana pengoperasionalan KIP tambang timah di Desa Rebo Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pokkok masalah yang diadakan dalam surat tersebut adalah konflik pemanfaatan ruang laut di wilayah laut di desa tersebut. Ini dua pengaduan yang kami dapatkan dari LKPI.

Lanjut, lalu mungkin kami punya kepentingan juga menyampaikan kepada Pimpinan dan Ibu, Bapak sekalian. Di mana peran Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP dalam penanganan pencemaran akibat penambangan timah di Bangka Belitung. Pada prinsip Pimpinan, Bapak Ketua, dan Ibu, Bapak sekalian. Kami di KKP itu memfasilitasi dan mendampingi atau memfasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan rencana zonasi WP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini Peraturan Daerahnya WP3K Bangka Belitung, KKP telah mendampingi proses penyusunan RZWP3K sesuai dengan Permen KP Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kemudian rancangan Perdanya terkait dengan RZWP3K telah dibahas dan disetujui oleh DPRD Bangka Belitung.

Kemudian rancangan Perdanya tentang RZWP3K telah dievaluasi oleh Kemdagri, jadi ini sudah sampai ke Kemdagri juga Pimpinan. Kemudian rancangan Perdanya terkait dengan RZWP3K telah ditandatangani Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mohon konfirmasinya nanti kalau keliru nanti kita akan coba sesuaikan.

Lanjut, ini hanya contoh saja Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi apa yang kami lakukan ini contoh yang ada di Muara Sungai Liat yang disengketakan. Jadi ada zonasi perikanan budidaya, ada zona pelabuhan perikanan, kemudian zoba industry. Nah, untuk dibagian muara sungainya

terdapat zona pelabuhan. Sub zona WKOPP (Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan), zona industry dan ada juga perikanan budidaya. Lanjut, kemudian ini contoh pengaturan ruang laut di sekitar muara Sungai Liat yang disengketakan. Ada zona wisata, zona perikanan budidaya, zona tambang dan zona perikanan tangkap. Yang menarik memang dicatat ini tambangnya ini sampai berhimpit kedaratan ini Pak Bupati dan Bapak Gubernur.

Lanjut, kemudian mungkin kami ditanya KKP sudah melakukan apa saja. Bapak Pimpinan, sebetulnya *last slide* saya pikir, atas seringnya pengaduan masyarakat dan seterusnya kami sebetulnya sejak tahun 2016 ini sudah melakukan komunikasi dan kordinasi kepada Pemda yang disampaikan oleh Menteri kami kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Intinya adalah kami sangat konsen dengan isu-isu degradasi lingkungan yang ada di wilayah Bangka Belitung. Meskipun sudah diterbitkan surat MKP kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait langkah-langkah bagi penyelesaian konflik di perairan lautnya. Namun, mohon ijin Bapak dan Ibu sekalian, kita juga masih menyimak sama-sama, melihat sama-sama konflik tetap dan terus terjadi hingga saat ini.

Lanjut, kenapa kami menyampaikan surat tersebut. Dasarnya adalah tentunya perlindungan kepada masyarakat, meminimalisasi gejolak sosial, kemudian penertiban atas ketentuan dan prosedur ijin pemanfaatan laut, kemudian penambangan pasir laut dekat pantai atau laut dangkal. Ini yang menjadi dasar pertimbangan kami.

Lanjut, kemudian tanggapan atas konflik kegiatan penambangan timah dengan nelayan di Bangka Belitung mohon ijin. Yang pertama, kondisi masyarakat di Bangka Belitung ini tidak bisa terlepas dari sektor pertambangan yang berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan serta kerusakan ekosistem terumbu karang. Yang kedua, dampak penambangan pasir menyebabkan perairan tersebut menjadi sangat keruh dan berdampak terhadap penurunan produktifitas tangkapan ikan nelayan dan seterusnya. Kemudian diperlukan penertiban maraknya KIP atau PIP ilegal yang mengganggu alur masyarakat nelayan.

Dengan adanya pergeseran kewenangan pusat dan Pemda diperlukan kordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait dengan permasalahan tambang agar tidak berdampak negative terhadap kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Kemudian semua pihak agar mematuhi aturan Perda Zonasi WP3K yang ditetapkan agar tidak terjadi konflik pemanfaatan WP3K.

Lanjut, satu slide lagi Bapak Pimpinan. Mohon ijin kami mohon kepada Bapak Gubernur sebetulnya kami meminta untuk menunda atau mengkaji ulang pemberian ijin lokasi perairan untuk kegiatan penambangan kepada PT. Timah Tbk atau kepada pihak manapun yang mengajukan ijin lokasi untuk kegiatan penambangan timah di laut dan menyeleraskan dengan Perda tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian yang kedua, berkordinasi dengan ESDM untuk meminta PT. Timah Tbk dan pihak lain agar menghentikan sementara semua aktifitas penambangan timah di laut menggunakan KIP atau PIP, hingga dicapai kesepakatan dengan masyarakat nelayan setempat. Kemudian yang ketiga, ijin Bapak Gubernur sekali lagi kami memohon Bapak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta Bupati mohon ijin agar memfasilitasi dialog terbuka dengan melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Direksi PT. Timah Tbk dan masyarakat setempat, baik yang menolak maupun yang mendukung kegiatan penambangan timah di laut menggunakan KIP maupun PIP dengan berpegang kepada Perda tentang Rencana Zonasi WP3K sebagai pedoman pemanfaatan ruang laut.

Dan yang terakhir Pak Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian. Semua kegiatan penambangan timah di laut menggunakan KIP maupun PIP dapat dimulai kembali setelah dicapai kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak yang bersengketa tentunya.

Demikian Pimpinan, Ibu dan Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili KKP mudah-mudahan bisa menambah wacana pada saat nanti diskusi dan pada saat nanti pengambilan keputusan.

Demikian.

*Wabillahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi menjelang siang.*

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Dirjen kuadrat karena jabatannya dua Dirjen.

Prinsip dasar adalah hampir semua memiliki sikap yang sama, bahwa penambangan ini memberikan kerugian material dan inmaterial terhadap masyarakat. Yang kedua, nanti kita lihat statistiknya apakah masyarakat Babel itu ekonomi tergerakkan oleh ekonomi penambangan atau ekonomi kelautan. Dari mulai pemanfaatan pantai sebagai daerah wisata, pemanfaatan ruang laut untuk perikanan. Mana sih sebenarnya yang menjadi gerakan ekonomi secara simultan.

Kemudian yang ketiga adalah ada ijin, ada pelanggaran. Pelanggarannya itu adalah menimbulkan problem, konflik lingkungan yang berdampak kepada kerugian masyarakat secara luas, apa tindakannya. Kemudian yang keempat adalah orang berijin, perusahaan berijin, kemudian legal tetapi dalam jangka panjang akan menimbulkan problem. Nah, empat hal ini yang nanti kita cermati, kita sikapi secara bersama-sama dan kita cari ruang hukumnya dimana kita masuk sehingga tindakan-tindakan kita menjadi legal.

Kalau persoalan psikologi saya paham Pak, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, berhubungan dengan penambang besar pasti yang menjadi nyali kita sering ciut bukan penambangnya tetapi dibalik penambang itu. Dan kita tahu bahwa kampanye pembelaan terhadap nelayan akan berat karena yang berpihak kepada penambang juga banyak, karena mereka siapa itu kalau di daerah biasanya preman itu, dapat dari itu dari nambang itu, dari kapal lewat, truk lewat, segala macam dia dapat. Dan seringkali mereka itu menjadi alat untuk berhadapan dengan rakyat.

Yang kedua adalah seringkali banyak orang yang menggunakan lembaga swadaya masyarakat itu atas nama nelayan tapi setuju penambangan ini sering saya aneh itu. Atas nama nelayan tapi setuju penambangan, ini banyak yang seperti itu di daerah, sehingga selalu dibuat menjadi konflik dua pro penambangan, anti penambangan. Ini dan kita tetapi saya yakin kalau kita bekerja berdasarkan hati semuanya akan bisa dilewati. Dan Bapak Gubernur silakan untuk klarifikasi tadi ada yang kepada Bapak Dirjen Gakkum.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Terima kasih Bapak Pimpinan Kang Dedi atas waktunya untuk yang kedua kalinya.

Jadi ada beberapa hal mungkin yang tadi disalah pengucapan saya. Bukan hasil Gakkum Pak Roy, tapi adalah ... (rekaman terputus) ... kepada Gakkum tanggal 19 Oktober 2020. Yang disitu menyatakan pencemarannya itu masih memenuhi baku mutu, tapi tetap perusahaan harus melakukan tindakan-tindakan perbaikan yang sampai sekarang pun pengawasan kami terakhir sudah dilakukan, kami sifatnya mendampingi Pak, kira-kira begitu Pak Roy untuk yang PT. BAA.

Pada prinsipnya kami Pemerintah Provinsi apa yang diperintahkan dari hasil daripada Gakkum selama itu inkrah ya kita lakukan, ini masalahnya. Jadi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KETUA RAPAT:

Mungkin Dirjen yang lain bukan Dirjen Bapak.
Oke, silakan.

DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Mohon ijin Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota, karena tadi menyangkut nama Gakkum Pak. Pak Gubernur menyampaikan hasil Gakkum Pak, dan itu ada konsekuensi Pak. Yang dilakukan PKTL itu mereka tidak melakukan pengambilan sample Pak, kami membawa tim khusus yang besar sekali jumlahnya, kami merespon karena kami tahu masyarakat itu sangat menderita saat itu Pak. Kami membawa tim besar, membawa lab dari Jakarta lab terakreditasi untuk melakukan proses bagaimana memastikan masyarakat

itu bisa kita lindungi Pak Dedi. Namun, apa yang terjadi kami dihalang-halangi disana dan semuanya. Ternyata tadi Pak Gubernur menyampaikan tadi, saya sempat terkejut dikatakan data Gakkum tidak bermasalah. Dan kami lain, karena kami kan sedang melakukan proses penyidikan terhadap perusahaan ini, karena ini akan ada dampak psikologis kepada publik. Dan kami juga punya video pernyataan Bapak Gubernur sebenarnya, ini kami punya video Pak. Ini ingin saya sampaikan mohon ini kami kenapa saya mengklarifikasi langsung Pak, karena ini penting. Nah, kita harus melindungi masyarakat kita, Pak Dedi menyampaikan ada 7 orang, 6 orang ditahan karena memperjuangkan.

KETUA RAPAT:

1 orang tersangka karena pegawainya beliau.

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Memperjuangkan hak mereka kepada lingkungan, kami tidak mencampuri urusan ini karena urusan proses penegakan hukum. Tapi saya tadi merespon Bapak Gubernur tadi menyampaikan bahwa data Gakkum, jadi saya perlu klarifikasi dan kami akan terus melanjutkan proses ini. Seperti disampaikan Bapak Dedi kami harus melakukan tindak lanjut proses-proses ini.

Terima kasih Bapak Dedi.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Jadi salah kamar Pak, kamarnya Karban bukan kamar Gakkum, kamar PPRL yang memberikan informasi. Secara prinsip yang penting Bapak Gubernur mempersilakan Gakkum untuk melanjutkan penyidikan.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Kami para prinsipnya Pak, akan melakukan apa yang sudah menjadi ketetapan hukum, tapi dalam hal ini lagi-lagi dilematis. Petani singkong kalau ini ditutup singkong yang sudah ditanam, singkong yang sudah masa panen itu tidak bisa dijual. Dijual ke pabrik lain pasti akan murah, karena dia tidak ada kemitraan. Tentunya sisi mana yang mau kita tegakkan, ini tinggal permasalahan lebih baik kita menyelesaikan baunya ini menjadi kurang bau, ketimbang menutup.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak, ijin Pak.

Belum menutup Pak, tenang saja. Solusinya nanti di Komisi IV DPR RI, sederhana dua hal solusinya sebenarnya, yang pertama adalah baunya nanti

hilang, perusahaan taat asas dalam pengelolaan limbah. Yang kedua, rakyat Bapak dibebaskan, itu saja.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Kalau pembebasan sudah Pak, ini tadi saya sudah ber-WA.

KETUA RAPAT:

Pengadilan harus mengikuti karena mereka sudah P21.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Ya dari Polisi sudah ke Kejaksaan, Kejaksaan kemarin malam sudah diserahkan kepada Pengadilan. Sekarang saya lagi nunggu jawaban Ketua Pengadilan Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dan kita mulai, kita ini pikirannya sama, visinya sama, kedudukannya yang berbeda, kemudian jabatan yang berbeda. Dan kita cari adalah cara untuk menyelesaikan ini. Dan kita mulai tanggapannya dari biasa yang paling awal masuk kantor, paling pagi adalah Ibu Endang, karena oleh cucunya disuruh "eyang berangkat pagi-pagi biar eyang sehat".

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS., M.Sc.):

Terima kasih.

Bapak Ketua yang saya banggakan,
Dan juga teman-teman Komisi IV DPR RI, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Bupati yang saya banggakan juga.

Jadi setelah mendengarkan semua keluhan Bapak Gubernur khususnya Bapak Dirjen ini, 3 Dirjen malahan ya. Kami menilai Pak, bahwa mungkin dari pusat tadi perlu ada koordinasi yang baik untuk menganalisis kembali tata ruangnya, karena kan kita khawatir tadi Pak, bahwa nelayan-nelayan kita ini tidak terlindungi baik kesejahteraannya, kesehatannya, apalagi nilai tukar nelayannya. Nah, padahal kita inginnya mengerakkan nelayan itu supaya kesejahteraannya naik. Jadi Bapak Gubernur sebagai penanggung jawab mohon jadi mematuhi aturan-aturan yang sudah ditentukan pusat tapi diimplementasikan secara manusiawi, terutama RTRW-nya Pak.

Nah, kemudian juga perlu dicek tadi Pak Dirjen Gakkum sudah menjelaskan bahwa harus ada analisa lebih lanjut. Nah, itu perlu Pak, karena

analisa air dan B3 itu penting sekali untuk kesehatan. Nah, jadi saya harapkan analisa-analisa ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang profesional Pak, karena kebetulan sekali banyak ahli-ahlinya tetapi sering tidak dimanfaatkan dengan baik.

Nah, yang terakhir mengevaluasi kinerja perusahaan tambangnya Pak, untuk mengimplementasikan peraturannya yang terkait dengan pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Kemudian berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Kemudian Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211 Tahun 1995 tentang Reklamasi Lahan Bekas Tambang. Kebetulan saya pernah masuk tim itu Pak, malah kalau di darat bekas-bekas tambang itu harus ditanami dengan tanaman perkebunan Pak. Kemudian Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan yang terakhir adalah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Mungkin itu Pak, yang perlu saya sampaikan semoga bisa berkoordinasi dengan baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Selanjutnya yang berkunjung kesana ini guru saya, tokoh besar kita, Kanjeng Darori. Mukanya sudah sangat cerah karena malam hujan.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Terima Kasih Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Gubernur, Bapak Bupati, para Dirjen dan teman-teman Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Apa yang disampaikan Bapak Gubernur itu sudah unek-uneknya keluar semua, itu luar biasa. Saya senang itu berarti Bapak terbuka, cuman Bapak sebagai Gubernur juga ada batasnya dan apalagi Bupati. Jadi saya kebetulan berempati kemarin yang kesana Bapak Gubernur di Ketuai oleh Bapak Dedi, saya Darori, ada Ibu Renny sama Bapak Slamet Madura, disini ada banyak Slamet soalnya Pak.

Jadi gini Pak Gubernur, bahwa kita membangun itu wawasannya itu minimal 3 kita pedomani, satu ekonomi, dua lingkungan dan tiga sosial. Saya

melihat di Bangka hanya faktor ekonomi saja yang dipikirkan, lingkungannya juga kalau Bapak terbang pulang nanti lihat di atas sudah warna putih semua, hampir sebagian besar bekas tambang, itu yang fakta.

Yang kedua Bapak Gubernur, kami ke Matras disitu dikatakan kira-kira pantainya hampir 40 kilo meter yang tercemar. Teman-teman mendalami langsung ke kapal dimana sama Bapak Dirjen Gakkum melihat kapal pengambilan pasir timah itu. Di sana bukan lihat pasir timah, terkejut Pak, di sana banyak aparat berbagai baju menggunakan senjata laras panjang. Ini berarti tanpa ada komando dari atas tidak mungkin, jadi kalau kayak gitu Bapak Bupati dan Gubernur tidak bisa bergerak.

Dan tuntutan masyarakat disana bagaimana kami nelayan bisa jalan. Permasalahan ini sudah lama Pak, saya pernah duduk disitu 10 tahun sebagai Dirjen dan pernah kami menjarakan rencananya kalau tidak salah Kombatin dibebaskan di pengadilan Pak. Saya kira paham lah ya, mungkin sebelum Bapak, kami dulu bolak-balik kesana.

Terus yang kedua, tadi disampaikan di Kenanga ya. Ini juga pada saat kami ketemu sama Pak Kejari sama Bapak Ketua, itu tadinya tahanan 20 hari kita mohon bukan mencampuri hukum bagaimana rakyat ini segera dilepas. Karena rakyat ini yang menuntut kok malah dipenjara, rakyat itu tidak tahu hukum Pak, dia buat tuntutan mungkin salah ya, tapi dipelintir ditahan dengan alasan berbagai. Saya gini-gini pernah jadi penyidik 30 tahun Pak, jadi paham itu sebenarnya terbalik ini. Tapi Bapak Dedi kita mengatakan tolong Pak Kejari, akhirnya Pak Kejari bilang Senin saya limpahkan ke Pengadilan tolong penangguhannya ke Pengadilan. Ini mohon Bapak Gubernur, ini saudara kita, rakyat kita, ingin menuntut malah dibalik mau dipenjara.

Nah, yang laporan Pak Kejari ada yang salah katanya tidak bau, tapi *alhamdulillah* diam-diam kita kesana sore ya Pak Ketua, ternyata sangat bau Pak. Itu ada 12 kolam kita hitung, mungkin kalau ini memang harus jalan terus ya mengenai baunya ini dihilangkan bagaimana caranya, teknologinya. Mungkin dari 12 mungkin bisa 16 kolam ya, jadi pencuciannya lebih detail lagi. Jangan menyerah itu, rakyat sebetulnya tidak akan menuntut tutup kalau memang tidak bau, tapi karena bau itulah. Dan ini berlarut-larut Pak, ini sudah 4 tahun ini. Ini perlu ditindaklanjuti.

Nah, satu lagi yang di Air Kantung itu pasirnya menggunung, karena tidak laku Pak, 1 kubik saya tanya Rp80 ribu. Tapi aneh lagi Pak, di luar yang ada ijin di dalam laut ada pengambilan pasir illegal yang punya katanya Anggota DPR RI, oknum. Ini informasinya Bapak Ketua, bukan Komisi IV DPR RI kalau Komisi IV DPR RI tidak ada ya. Ini laporan tidak berani Pak, soal benar atau tidaknya perlu kita dalami.

Kesimpulan saya Pak Dedi, kalau seperti ini Bapak Dirjen Gakkum, Dirjen dari Kelautan sudah membuat rekomendasi dan sebagainya. Karena ini lintas Pak, lintas Komisi dan ada penegakkan hukum, ada terkait, kami sarankan dibentuk Pansus Pak. Kalau mau serius, kalau hanya gini seperti dulu, saya waktu disitu duduk ya rapat panggil Komisi IV DPR RI, habis itu

sudah selesai, kayak hangat-hangat tai ayam saja. Nah, kalau kita mau serius ya *monggo* tapi kalau tidak ya kita bantu Gubernur dan Bupati bagaimana menghasilkan PNBP-nya tapi lingkungannya dan sosialnya itu aman rakyatnya, kan gitu Pak Gubernur ya.

Jadi Pak Gubernur ini kemarin “ini Gubernur, Bupatinya enak-enak saja yang menikmati”, ternyata tidak seperti yang disampaikan, kan nggak enak Pak. Itu laporan masyarakat “bagaimana Gubernur, Bupati?” “nggak mau tahu Pak, mungkin sudah dapat bagian”, waduh kan nggak enak kita. Duitnya banyak, saya terus terang “terima kasih informasinya”, saya yakin keterbukaan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, untung kalau kayak gitu kan Bapak bisa diselidik Pak, kekayaannya. Karena saya yakin harta Bapak halal barokah nggak ada yang aneh-aneh, makanya sehat ya Pak ya.

Saya kira itu Pak Ketua, saran saya di Pansuskan dengan lintas, mungkin ini disini yang hadir dari Komisi menandatangani untuk diusulkan dalam Paripurna. Faktanya sudah ada kita, kalau seperti ini saya tidak tahu Bangka kedepannya jadi apa.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Kanjeng.

Kalau ngomong kekayaan sih kekayaan Gubernur tidak seberapa dibandingkan kekayaan Kanjeng. Kanjeng ini kekayaannya banyak sekali, karena kemanapun pergi pasti ada yang nyapa, ada yang WA, ada yang nganter oleh-oleh. Dan diantara kita yang disini yang paling miskin Bapak Budi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, karena istri pun nggak punya. Biar nggak tegang-tegang, biar Gakkum nggak tegang sama Gubernur, biar *clear* lah. Tapi memang Gakkum itukan malaikat pencabut nyawa, tidak boleh senyum, Bapak memang mukanya harus begitu, lurus walaupun sama senjata laras panjang dua agak sedikit “Pak Dedi jangan naik itu bawa senjata”. Saya tahulah psikologi Gubernur itu tahulah kita, karena tegas-tegas, kencang-kencang mereka di-*back up* besok dicari-cari salah, kan biasa begitu. Kita cari solusinya, kita bikin opini saja yang kuat. Jadi kalau Pansus ya saya setuju kita bikin banyak Pansus, mau apa lagi yang dicari di negeri ini kita lurus saja, tapi jalannya tol jangan nabrak.

Nah, selanjutnya ini orang yang administrator biasa, ini sebenarnya pekerjaan paling dulu itu pekerjaan paling enak itu. Pengacara sih ngurusin masalah dari orang yang bermasalah, bisa jadi bayarnya itu dia nggak punya uang tapi karena masalahnya selesai akhirnya bayar. Kalau dia kan mengurus persoalan ngambil duit dari kebahagiaan, ada yang jual ada yang beli bayangin saja. Yang beli punya uang yang menjual punya uang, ini cuman tiba-tiba masuk DPR RI saya aneh juga, ini notaris ini Ibu Renny

Astuti. Nasibnya sangat bagus, Bapak Edhy jadi Menteri, Ibu Renny jadi Anggota DPR RI, nggak usah diterusin bahasan berikutnya.

Terima kasih.

F-GERINDRA (RENNY ASTUTI, S.H., S.PN.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Gubernur Bangka Belitung, Bapak Bupati, Bapak Dirjen Gakkum dan Dirjen PSDKP, Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang saya banggakan.

Saya satu-satunya wanita paling cantik kemarin ikut Bapak Dedi sama Bapak Kanjeng, karena dari sekian yang terdaftar ternyata kita berangkat cuman 4 orang, saya tidak ada saingan berangkat sendiri perempuan kemarin.

Ada beberapa catatan tetapi tadi secara garis besar sebetulnya sudah disampaikan oleh Bapak Darori. Kami kemarin mendatangi beberapa lokasi dalam rangka Kunker Spesifik Komisi IV DPR RI, tetapi Pak ada tetapinya begitu tiba di bandara kami harus memutar haluan. Karena sebetulnya ini tidak termasuk di dalam jadwal kunjungan kami, tapi karena sudah dihadang oleh masyarakat Pak Dedi dan Bapak Darori memutuskan kita putar balik, sehingga kemarin Anggota Bapak yang menjemput kami kebingungan Pak, karena kami tidak mengikuti jadwal semula.

Yang ingin saya sampaikan Pak, untuk pabrik tepung tapioca yang di Kenanga. Tadi Bapak mengatakan bahwa tidak ada pencemaran disana, sama seperti tadi yang disampaikan Bapak Darori. Secara diam-diam diluar jadwal kami, kami meninjau langsung lokasi pabrik tapioca ini dan disana kami juga sangat terkejut melihat limbah pabrik tapioca ini. Ternyata limbahnya hanya disalurkan ke dalam kolam saja dan itu baunya kemana-mana. Dan disana kami juga sempat mendengarkan penjelasan dari seseorang yang seharusnya tidak menjelaskan langsung kepada kami. Saya kemarin minta kepada Bapak Roy, Bapak Roy saya minta laporan berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Gakkum.

Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, atas nama kemanusiaan saja Pak, kemarin ada beberapa mantan Ketua RT yang ditahan disana, itu ada dua orang perempuan Pak. Ada dua orang perempuan, satu orang itu dalam kondisi hamil. Saya mohon bantuan Bapak sebagai Kepala Daerah disana berpihak kepada masyarakat kecil, mohon bantuannya untuk membantu mereka ini. Karena miris sekali kemarin keluarganya itu nangis kepada Bapak Dedi mohon bantuan Pak. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, mengenai Pantai Matras. Kemarin setiba di Pantai Matras kami juga kaget karena ternyata banyak sekali aparat yang menyambut kami. Jadi kita juga bingung ini aparat ini rasanya kalau menyambut Komisi IV DPR RI tidak sebanyak itu, tetapi karena masyarakat sudah sangat sekali dan kami juga bertemu langsung dengan masyarakat kemarin sebetulnya kalau saya meligat agak dihalangin Pak Roy kayak gitu ya, karena aparat memang mereka terus terang kita lihat kemarin ada beberapa intel disana. Tetapi karena kita atas nama Komisi IV DPR RI kita tetap duduk di pasir karena kita memang tidak minta disambut secara resmi. Pak Dedi senang sekali dengan suasana seperti itu dan kita mendengarkan langsung keluhan masyarakat Pak. Saya sangat berharap Pak, Pemerintah berpihak kepada para nelayan ini karena di lapangan kami melihat langsung para nelayan itu menangis karena mereka tidak bisa lagi mendapatkan hasil tangkapan akibat dari penambangan pasir KIP ini.

Memang seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak ada kompensasi, tetapi kemarin kami juga tanya kepada masyarakat disana kompensasinya juga sangat tidak sesuai Pak. Kalau tidak salah kemarin masyarakat menyampaikan hanya Rp400 ribu per 6 bulan, mau makan apa mereka Pak. Jadi saya juga mohon Pemerintah berpihak kepada para nelayan ini. Tidak hanya mendahulukan nilai ekonomi saja karena masyarakat di sana menggantungkan hidupnya dari perairan di sana.

Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak, mungkin teman-teman yang lain nanti yang kelapangan langsung bisa menambahkan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Sebenarnya nanti begini di Undang-Undang Cipta Kerja itu RTRW kan bisa diterjemahkan dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati, sehingga Bapak Gubernur bisa melakukan revisi sebenarnya terhadap berbagai kawasan yang hari ini dianggap menjadi problem ketika terjadi penambangan. Ini coba Bapak dengan bagian hukum untuk mengkordinasikan, sehingga misalnya batas mill dan kemudian kawasan Matras itu, itukan perairan umum ya dan untuk pariwisata. Nah, kan perairan umum, perairan ada penambangan, kan nggak mungkin pariwisata disananya kapal tambang itukan nggak mungkin. Coba nanti dilihat celah-celah hukumnya sehingga kita bisa secara bersama-sama untuk menyelamatkan lingkungan.

Selanjutnya Bapak Gubenur, Bapak Bupati semuanya juga setia pada lautnya dan laut harus dirawat dengan budipekerti yang baik agar saling memberikan keuntungan bagi yang menghuni dan dihuni.

Silakan Bapak Budi Setiawan.

F-PG (BUDHY SETIAWAN):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang saya hormati rekan-rekan Komisi IV DPR RI dan juga dari tamu yang di dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

Sebenarnya persoalan penambangan yang dilakukan oleh PT. Timah ini sebenarnya kalau bicara kasus sudah banyak, sudah bertumpuk, sudah bertahun-tahun. Dan sebenarnya problemnya bukan cuman di Bangka Belitung, di Kepri pun problem ini muncul jadi bukan hanya di kepulauan ini saja, bukan satu provinsi ini, juga ada di provinsi lain problem. Nah, itu dia justru dengan mengundang kapal ponton pengundang yang bisa menghasilkan isapan lebih besar inikan diharapkan bisa meningkatkan produksi. Tetapikan problemnya inikan soal lingkungan, apa yang menjadi rekomendasi dari Dirjen PRL dari KKP jelas bahwa terjadi degradasi lingkungan.

Mohon maaf Pak, ini mungkin perlu dilihat juga bukan terhadap kasus yang illegal. Kasus yang penambangan legal sesuai dengan ijin pun perlu dilihat bahwa kapal ponton pasir isap yang digunakan itu sudahkan sesuai spec-nya dengan kondisi lingkungan kita. Saya tahu itu kapal semua buatan dari luar negeri kebanyakan dari Thailand itu diambil kapal-kapal itu. Di sana lautnya dalam Pak, di kita langsung berhubungan dengan karang. Dan langsung berhubungan dengan ekosistem di bawah laut itu karena dekat sekali. Ini kerusakan lingkungan yang memang sudah terjadi sebenarnya sudah lama dan bukan hanya disini. Saya setuju dengan Bapak Kanjeng, ini harus diangkat menjadi sebuah Pansus, supaya jelas persoalannya. PT. Timah mengaku rugi tetapi ini ada kerugian yang lebih besar ketimbang PT. Timah, yaitu kerugian kerusakan lingkungan ini.

Selain itu memang ada kasus-kasus yang sekarang terjadi, seperti kasus pemenuhan, kasus-kasus yang kelihatannya menunjukkan ketidakberpihakan terhadap protes-protes masyarakat. Masyarakat protes kan tentu harus didengarkan bukan kemudian harus ditindak dengan cara yang menunjukkan seolah-olah tidak ada keberpihakan terhadap masyarakat. Nah, ini juga harus ada langkah-langkah penyesuaian terhadap kasus yang tidak perlu juga harus menunggu Pansus, karena Pansus ini masalah kebijakan Pak. Nanti kita bicara kebijakan lebih mendasar disini, saya setuju ini diangkat menjadi sebuah Pansus tetapi juga perlu ada rekomendasi terhadap beberapa kasus yang dimunculkan terkait kondisi belakangan ini yang perlu tentunya harus disikapi oleh Bapak Gubernur juga harus disikapi oleh PT. Timah. Rasanya kalau misalnya kompensasi yang kecil seperti itu yang saya dengar itukan ya haduh murah sekali ini biaya kita merusak lingkungan dan merusak mata pencaharian orang. Jadi harus diperhitungkan itu tentu harus ada langkah-langkah yang jelas dalam rekomendasi nanti Komisi IV DPR RI terhadap kasus. Dan juga saya mendukung agar dibentuk Pansus.

Terima kasih, demikian.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Ada logika yang sebenarnya menjadi terus pertanyaan dalam pikiran saya. Ini perusahaan itu rugi tapi nambang terus, kan aneh gitu loh. Kalau sudah rugi ya tutup, karena ruginya dua sudah perusahaannya rugi merusak lingkungan. Kalaupun merusak kan harus untung buat negara, ini merusak lingkungan dan merugikan negara, kan gila tapi terus. Nah, inikan nanti ada hal yang nantilah biar lembaga lain yang meneliti. Nah, bagaimana cara nyari duit bisa untung terus. Nah, saya lihat kan yang nambangnya bukan PT. Timah tetapi subnya kan, ada PT. Timah ada juga subnya. Nah, apakah disubnya itu artinya antara data kontrak dengan data bawah tangannya beda kan kita tidak tahu, itu urusan penyidik.

Selanjutnya agar lebih memahami secara detail dan punya solusi, Pimpinan kita ini yang lagi mencari jodoh silakan untuk memberikan tanggapan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Miskin istri Pak Dedi.

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak Gubernur, Bapak-bapak para Bupati, para Dirjen, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami apresiasi tadi Bapak Gubernur dan para Bupati telah curhat kepada kami juga tentang permasalahan, kendala-kendala terkait penambangan timah apakah itu di darat dan di laut yang banyak mencederai bukan cuman masyarakat tapi juga alam lingkungan yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Saya kira tadi Bapak-bapak sudah bisa mendengar juga pendapat atau cara pandang dari Komisi IV DPR RI. Saya kira dari kami dua hal yang paling penting itu adalah pertama adalah keberlangsungan masyarakat rakyat khususnya para nelayan. Dan yang kedua adalah keberlangsungan alam atau lingkungan hidup. Yang kita tahu penambangan timah ini sebagai industry usaha itu manfaatnya secara ekonomi itu ada, tapi dampaknya juga luar biasa.

Kita tidak pungkiri bahwa ini menyumbang banyak devisa tetapi yang kita ingin kedepankan disini adalah tata kelolanya Pak Gubernur dan Bapak Bupati. Tadi sudah dijelaskan oleh Dirjen Gakkum dan juga Dirjen dari KKP bahwa ada instrumen-instrumen Undang-Undang Peraturan yang bisa mendukung pengawasan dan juga penindakan bagi Bapak-bapak untuk mengawasi jangan sampai kerusakan-kerusakan terjadi lebih dalam lagi. Ini semangat Komisi IV DPR RI dalam kesempatan ini saya rasa sangat jelas. Dan tadi sudah dikemukakan Anggota-Anggota yang ingin menaikkan isu ini

menjadi sebuah Pansus. Secara teknis kita tahu bersama ini permasalahannya begitu kompleks dan dari sisi industry limbah atau teling yang dibuang dari pengelolaan ini, ini dampaknya terhadap ekosistem darat maupun laut itu ya sangat dasyat Pak. Kita mau memperhatikan sebuah wilayah di bawah berapa mill tapi dengan pengerukan yang berlanjut-lanjut otomatis ekosistem di sekitarnya itu akan terdampak semua, karena biodata dan keberlangsungan alam di bawah laut itu ya saling tergantung. Bukan cuman ikannya yang nanti tidak bisa dikonsumsi oleh rakyat tetapi juga antara ekosistem laut itu sendiri pasti juga akan terdampak.

Nah, inikan ke depan kita ingin mengedepankan tata kelola usaha pemanfaatan sumber daya timah ini yang lebih responsible, lebih berkelanjutan. Oleh sebab itu, ya kita sama-sama dari Komisi IV DPR RI ingin memberikan support kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, Dirjen Gakkum. Bapak Dirjen Gakkum ini memang benar saya setuju Bapak Dedi mukanya harus sangar terus Pak Roy. Dan teman-teman di KKP ini pekerjaan kita sama-sama, ini kita satu *stake holder* besar untuk urusan ini. Jadi saya ingin memberikan dukungan kami, dukungan saya juga teman-teman untuk memberikan *support* yang lebih dalam lagi kepada para Kepala Daerah maupun teman-teman Eselon I mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga ini kedepannya nanti kita akan menyelaraskan juga dengan teman-teman yang berada mungkin di komisi-komisi lain di DPR RI, karena ini ruang lingkupnya sangat luas.

Saya kira demikian Pimpinan, Bapak Dedi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Sudah selesai Anggota, masih ada? Pak Salim Fakhry.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Terima kasih Bapak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Gubernur, Bapak Bupati, para Dirjen, Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Setelah mendengar tadi paparan

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu.

Selamat datang Pak Slamet Ariyadi Madura, raja bebek.

Terima kasih.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bapak Ketua, Bapak Gubernur, para Bupati, Bapak Dirjen yang hadir dan kita semua.

Tadi mendengar apa yang dijelaskan Ibu Renny tadi beruntung beliau Pak Ketua, karena 4 rombongan 1 beliau yang putri. Sebagai teman, sahabat Komisi IV DPR RI kami merasa salut dan bangga atas Pimpinan Bapak Dedi yang 4 orang cuman Ibu Renny tidak pernah hitung Bapak Slamet tadi. Yang dihitung Pak Darori dan Bapak Wakil Ketua Bapak Dedi, inilah nasib Slamet memang mungkin kalau ada apa-apa itu lebih uang perjalanan pun Bapak Slamet tidak dapat bagian Ibu.

Kami melihat Bapak Ketua, di group kita bagaimana Bapak Ketua memimpin yang Anggota duduk di pasir. Walaupun kami dari tim lain merasa iba melihat 4, cuman itulah nasib, cuman inilah nasib membawa keberuntungan Bapak Gubernur. Karena 4 putra terbaik Komisi IV DPR RI ini bisa membawa hari ini kita bisa diskusi Pak Gubernur, walaupun tadi Bapak Roy agak tegang saya kira ini menunjukkan tujuan kita untuk menyelamatkan masyarakat saja.

Saya kira Bapak Ketua, mari kita berpegang kepada Undang-Undang saja Pak Ketua. Jika ini sudah merusak, mengganggu mata pencaharian khususnya mata pencaharian nelayan kita balikkan saja kepada aturan. Saya setuju dengan pendapat dari Bapak Darori meningkatkan ini apakah Panja, baik Budi tadi ataupun Pansus. Cuman kalau Panja kan khusus di Komisi IV DPR RI, kalau Pansus ini ada lintas Komisi. Kalau tidak salah saya Komisi VII DPR RI ikut juga ada mungkin Komisi VI DPR RI juga ikut. Cuman ini nanti setelah kita majukan ada persetujuan dari lintas Fraksi ya Pak Darori, Panja kah atau intinya apa Bapak Ketua, kita bantu masyarakat, kita bela.

Tadi yang sangat aneh Pak Ketua katakan tambangnya rugi kok terus, supaya jangan terjadi fitnah seolah-olah tadi Bapak Ketua sudah katakan kalau harta Pak Darori yang terkaya, kalau masalah istri Pak Wakil Ketua yang paling miskin. Walaupun itu ada mungkin yang melihat itu Vita saya tengok disana mungkin hati Vita ini berbunga-bunga online.

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu kalau dibilang ada Vita berbunga-bunga lihat Pak Budi, ada yang hatinya sekarang mangkelnya luar biasa merasa tersisihkan, Slamet Ariyadi.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sudah disampaikan kan, dia tanya tadi sama saya ini supaya jangan apa Pak Gubernur, Bapak Bupati, “ini Bang, saya pun ikut hari itu 4 tim kok saya nggak dibilang Ibu Renny”, makanya nanti Pak Slamet pulang dari sini tanya Ketua apa hasil dari pada Bangka Belitung, maksudnya hasil rapat jangan hasil-hasil yang lain ini bahaya.

Jadi itu Pak Ketua, menurut sumbang saran saya. Malah kalau saya tidak salah sudah 3 tahun, 2017 sampai 2020 apalagi yang tambang-tambang illegal Bapak Ketua, sudah banyak memakan korban Pak Roy. Kalau menurut data ada pada saya lebih kurang sudah 60 orang. Tujuan kita mengadakan Panja apa? Untuk mencabut ijin ini, cuman kita tidak boleh semena-mena mencabut ijin sesuatu itu sementara ijin sudah dikeluarkan. Dengan terbentuknya Panja atau Pansus ini nanti maka terbuka langkah apa yang supaya jangan ada fitnah, seolah-olah Bapak Gubernur ini sudah sama Bapak Bupati yang dikasihkan oleh tambang timah. Mohon maaf seolah-olah ya sudah padahal ini tim 4 kesana tidak beres, apalagi macam kami di Jogja tim full. Kalau kami yang tim di Jogja dapatnya full yang amplop resmi Pak, kan tidak salah, amplop coklat kan resmi. Tadi Ibu Renny bilang “kami disambut dengan senjata laras panjang” kami bingung apakah 4 orang ini perlu pengawalan. Makanya saya Pak Darori besok ke Jambi saya lebih mau ikut Pak Wakil Ketua, Bapak Dedi. Saya minta langsung sama Bapak Dedi saya ikut ke Jambi saja. Sebab ketika beliau ini memimpin saya tengok Pak Budi tidak ada duanya Pak Budi, supaya kalau ada pembagian jelas, bagian kerja Pak Ketua.

Saya kira itu saja Pak Ketua, intinya apa? Kita membantu rakyat apalagi ada Ibu-ibu yang hamil yang sudah masuk penjara. Tadi ini perlu kita pikirkan bagaimana sebab hukum itupun kan hukum ini karena ada yang salah maka dihukum, karena ada peraturan maka ada orang yang salah, kalau salah peraturan kita perbaiki. Makanya melalui rapat hari ini Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini mungkin bisa mencari solusi di dalam kesimpulan nanti harus konkrit Bapak Ketua. Jangan karena Bapak Sudin tidak hadir disini kita rapat tidak konkrit, disini kita tunjukkan ketidakhadiran Ketua kita juga mampu membuat keputusan yang konkrit.

Terima kasih Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Salim Fakhry.

Dengan ucapan-ucapannya yang memberikan motivasi bunga penuh madu kepada saya. Saya tidak tahu apa dibalik itu karena Bapak Salim orang Aceh, saya harus bisa paham dari ucapannya itu pasti bersayab banyak itu. Jadi kalau Bapak Gubernur, Bapak Bupati kalau saya yang memimpin rapat

pasti rileks Pak, ketegangan itu berubah jadi kelembutan, tapi yang lembut belum tentu bisa dikalahkan, itu penting.

Memang saya ini waktu itu kunjungan saya ini dengan Kanjeng Darori itu sudah ke Indramayu, sudah dimasukin dari ke Indramayu tiba-tiba harus ke Bangka. Biasa kalau urusan yang rusuh itu biasanya saya yang dikasih tugas. Besok saya sudah Bekasi tiba-tiba harus ke Jambi, jadi yang urusan dengan bau, penambangan, pencemaran limbah pasti diserahkan sama saya. Dan saya bersedia menampung limbah rumah tangga saya bersedia menampung, maksudnya yang cerai-cerai silakan saya tampung semuanya.

ANGGOTA KOMISI IV DPR:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan beserta seluruh Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Gubernur, Bupati, dari Bapak Dirjen Gakkum dan dari Perikanan beserta seluruh jajaran.

Sebenarnya sama saja tapi karena saya terakhir kenapa saya minta juga untuk bicara tadi, karena indah sekali bahasa Bapak Dedi tadi. Ini gila kata Bapak Dedi, itu yang saya suka Bapak Dedi, itu bahasa gila. Sebagaimana kita pahami disini kita sebagai Komisi IV DPR RI dengan kondisi seperti apa yang dijelaskan Bupati, kemudian Bapak Roy tadi bahwa terlepas sekarang sudah bisa masuk, premanisme juga dilapangan terjadi. Ini kita disini saya berharap pada pertemuan ini, ini bisa meluruskan orang gila. Kalau Bapak Dedi tadi mengatakan ini kondisi gila, benar kenapa Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa alam dan ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, ternyata hari ini yang korban siapa. Luar biasa Bangka, Allah memberikan kekayaan tambang timah itu untuk siapa? Bukan untuk Gubernur, bukan untuk Bupati, untuk rakyat. Tetapi apa hasil yang diterima rakyat, problem hari ini. Malah tadi saya kemarin tidak ikut ke Bangka Belitung tapi saya dengar dari teman-teman tadi malah rakyat protes akibat problemnya malah dipenjara. Berarti bahwa maksud Allah ingin memberikan kekayaan alam timah untuk Bangka, tujuannya untuk rakyat malah mengorbankan rakyat. Inikan kita murka terhadap rahmat Allah di Bangka.

Yang kedua, kita hari ini saya berbangga bisa hadir Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kita bisa mendengar secara bersama-sama hari ini. Tetapi sudah sekian tahun sudah 4 tahun permasalahan tidak selesai-selesai. Apakah kita sebagai maaf punya *policy*, punya tanggungjawab kebijakan yang bisa kita ambil apakah cukup dengan prihatin, cukup dengan kita dorong, cukup dengan kita minta tanpa langkah yang konkrit. Saya pastikan Bapak Dedi, Bapak Ketua yang terhormat, Anggota Dewan yang terhormat dan Bapak Bupati, kalau ini tidak ditingkatkan menjadi Pansus saya pastikan ini hanya ruang diskusi saja tidak akan selesai.

Orang mengatakan kalau anda tidak punya kuasa anda cukup bersorak. Kalau anda tidak memiliki kekuasaan maka gunakan mulutmu untuk

bersuara. Tapi kalau anda punya kekuasaan gunakan jabatan, kekuasaanmu untuk menyelesaikan, maka tidak ada solusi lain menurut saya selain kita bentuk Pansus. Kalau kita nggak sepakat bentuk Pansus nggak akan selesai. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan.

*Billahi Taufik Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih.

Ini luar biasa semangat bikin Pansus, Pansus Pencemaran Kerusakan Lingkungan di Pulau Bangka judulnya itu. Jadi bukan hanya Matras tapi seluruh Bangka agar negara melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang didalamnya rakyat mengalami sebuah derita. Saya berulang-ulang karena pikirkan hari ini jangankan yang ketika tambangnya berjaya rakyat tidak dapat apa-apa, apalagi nanti kalau tambangnya sudah tidak ada.

Seluruh rangkaian ini tidak akan sah kalau tidak ditutup oleh komentar seorang politisi muda, jauh dari tanah Madura. Dan ini adalah binaan Bapak Ketua ini saya lihat, cerdas, muda dan pengen jadi Bupati. Orang lain sudah bosan jadi Bupati, ini baru mau jadi Bupati. Dan ada satu hal yang membuat dia menderita hari ini pesonanya kalah oleh Budi Djiwandono untuk urusan Vita.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota yang saya sangat hormati dan kami banggakan, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Bupati, Bapak Dirjen dan semua hadir diruangan yang saya sangat hormati.

Prinsipnya pada kesempatan hari ini sudah disampaikan oleh teman-teman dan Pimpinan, apa yang menjadi temuan kita karena betul apa yang disampaikan oleh Bang Salim Fakhry saya kebetulan kesana kita berempat. Dan kalau menurut Ibu Renny beliau yang paling cantic dan saya yang paling milenial yang ikut.

Jadi pada prinsipnya kita rumuskan terkait masalah PT. Timah ataupun PT. BAA ya yang bergerak dibidang tapioca dan juga terkait masalah penambangan pasir, ada yang illegal dan ada yang legal. Tentunya kita jangan sampai multi tafsir pada kesempatan hari ini kita hanya bertorika tanpa ada solusi yang konkrit. Tentunya ketikakita melihat adanya beberapa diskusi tadi mungkin terlihat ... (rekaman terputus) ... serta mediator, mediasi, kepada masyarakat dan juga kepada Pemerintah khususnya kepada Kementerian dan Lembaga terkait dalam penegakkan pencemaran

lingkungan yang di Bangka ini. tentunya ketika kita melihat apa yang terjadi di daerah Bangka sempat disampaikan oleh Ibu Renny tadi kita sangat miris ketika mendengarkan khususnya dari adanya PT. Timah yang bergerak di penambangan timah mereka hanya diberikan kompensasi sebesar Rp400 ribu selama 3 bulan bahkan ada yang menerima khususnya bagi mereka yang pro.

Tentunya kita hari ini perlu untuk melakukan suatu sikap dan komitmen yang tegas terkait dengan masalah kompensasi karena ini bukan masalah sisi lain bukan masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Jangan sampai masyarakat di Bangka ini hanya terbayarkan rasa kecewanya dengan Rp400 ribu yang selama 3 bulan karena ini masalah sosial yang perlu kita respon, perlu kita betul-betul perhatikan. Apalagi kita melihat tadi berdasarkan dari Bapak Dirjen TB menyampaikan pada 8 April 2020 ini sudah ada aduan dari LKPI tentang ditangkapnya 6 nelayan di wilayah Matras.

Ini teman-teman belum mengutip tentang ini, kita mungkin ada yang belum tahu tentang nasib 6 nelayan yang ditangkap ini Pak. Jadi ini mungkin Pimpinan, selain 6 orang yang ditangkap terkait masalah pengaduan di PT. BAA ini harus menjadi perhatian khusus apa yang menjadi laporan dan pengaduan LKPI ini terkait dengan masalah nasib dan bantuan hukum oleh 6 nelayan yang ditangkap khususnya di wilayah masalah pengoperasian KIP. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait masalah pencemaran lingkungan yang di Tapeoka ini betul apa yang disampaikan oleh Ibu Renny. Saakan-akan kemarin kita turun ke lapangan, kita sidak adanya 12 kolam yang dijadikan tempat penampungan untuk air limbah ya, air limbah yang memang baunya sangat menyengat. Mungkin teman-teman yang hadir di sana hanya beberapa jam itu sudah tidak kuat Pak Darori ini sudah pakai parfume dan sebagainya karena bau apalagi teman-teman yang ada di sekitar, siang hari, siang malam bahkan baunya mengikuti arah angin ini perlu dicarikan solusi.

Jangan khawatir Bapak Gubernur kita tidak hanya sewenang-wenang untuk menutup akan tetapi kita mencari solusi bagaimana solusi ini menjadi solusi bersama bagi masyarakat di Bangka, seperti itu. Jangan seakan-akan ketika kita ingin melakukan penindakan Gakkum meskipun dianggap salah kamar mendapatkan perlakuan yang kurang eloklah ataupun dihadang-hadangi bahkan ada seorang yang menjadi pahlawan kesiangan atas nama organisasi besar ini sangat tidak elok Pak. Kemarin dia datang kesana menjelaskan dengan gagahnya, dengan percaya dirinya dia mengatasnamakan organisasi Islam yang terbesar di Indonesia ini membela adanya pencemaran lingkungan ini.

Ketika kita lihat Pak, disini ada instrument dan dari otoritas pengendalian kegiatan pertambangan disini sudah dijelaskan oleh Dirjen Gakkum, setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawaban usaha ataupun kegiatan terhadap perijinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang mengakibatkan

terjadinya pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Ini tidak hilang nyawanya Pak, tetapi kalau terus-terusan *Insy Allah* bisa stress dan bisa meninggal Pak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Tapi disana ini terbalik Pak, yang dipenjara mereka yang memberikan pengaduan kepada Pemerintah mereka dipenjara dengan dalih mereka memalsukan dokumen yang dianggap RT sudah mengundurkan diri memberikan bukti otentik dengan stempel mereka ditahan selama 20 hari kurang lebih Pak.

Jadi ini yang perlu kita pikirkan bersama hari ini untuk teman-teman. Dan saya pun sepakat dari Fraksi PAN untuk melakukan untuk diajukan kepada Pansus. Kami tidak ingin hanya sebatas retorika, hanya sebatas hari ini, sebatas diskusi belaka akan tetapi ada solusi yang solutif. Itu saja sekian dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih ya Pak Slamet, mudah-mudahan menyelamatkan kita semua. Selamat rakyat Kepulauan Bangka Belitung dari dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan kapal isap dan penambangan timah lainnya. Ada dua hal titik pokok yang harus menjadi focus kita, yang pertama adalah Pansus itu jangka waktunya lama panjang dan harus melalui proses yang persetujuan Fraksi di Paripurnakan. Tetapi nelayan menghadapi problem kerusakan lingkungan berdampak kepada berhentinya dia melaut dengan mill yang lebih jauh mungkin di atas 12 mill itu tidak mungkin dilakukan karena dia tidak memiliki teknologi kapal yang memadai. Andaikata di kasih kapal dia belum tentu juga bisa dioperasikan, kenapa? Kemampuan modal yang dia miliki untuk melaut sangat terbatas dan jangkauan-jangkauan penangkapan ikannya pun sangat terbatas, pasarnya pun bisa jadi pasar langganan yang terbatas. Artinya, harus ada keputusan jangka pendek kita yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk mencari celah hukum menghentikan operasional kapal isap yang menimbulkan kerugian bagi nelayan.

Komisi IV DPR RI adalah konsen pada dua hal, bukan pada pengelolaan BUMN-nya bukan konsen kita. Tetapi kita konsen pada kerusakan lingkungan yang menjadi kewenangan Komisi IV DPR RI dan hilangnya mata pencaharian nelayan yang itu juga menjadi kewenangan Komisi IV DPR RI. Hal pertama inilah yang harus pada hari ini menjadi rumusan kita apa sih langkah kita agar dia geser atau henti dulu operasionalnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus secara bersama-sama mencari rumusan hukum jangka pendek yang bisa merubah zonasinya dan jaraknya melautnya. Nah, ini yang harus kita lakukan dalam jangka pendek ini. Kemudian yang ketiga adalah celah hukum penindakan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan seluruh operasional berbagai kegiatan, baik industry maupun pertambangan yang merugikan kepentingan masyarakat.

Jumlah orang yang meninggal akibat kelalaian dalam pengelolaan penambangan jangan hanya dilihat dari jumlah hari ini yang meninggal tapi efek pencemaran dalam jangka panjang yang meninggalkan problem penyakit di tengah masyarakat merupakan bagian terpenting lainnya. Untuk itu, saya minta Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan audit lingkungan terhadap Kepulauan Bangka Belitung secara menyeluruh efek ekonomi apa dampak dari penambangan. Efek kerusakan lingkungan apa yang terjadi, penyakit apa yang bisa timbul dikemudian hari, kemudian kerugian ekonomi apa yang akan dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung dalam perspektif 5-10 tahun ke depan. Dan itu sebenarnya menjadi bagian terpenting dari perjalanan pemerintahan Provinsi Bangka Belitung dan Kabupaten Kota yang ada di Bangka Belitung. Nah, ini pokok-pokok hal yang menjadi konsen kita pada hari ini.

Dan selanjutnya dipersilakan Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Dirjen untuk memberikan jawaban. Dan saya tegaskan lagi konsen kita sama, masalah ini harus selesai dan selesainya bukan pada keputusan tetapi pada tindakan yang lebih nyata. Dan saya meminta Sekretariat untuk memberikan jadwal lagi setelah ini kita melakukan operasi secara bersama. Komisi IV DPR RI *backup* secara politik, kemudian Gubernur, Bapak Dirjen juga melakukan langkah yang lebih nyata secara teknis. Jangan pernah kita takut untuk membela rakyat dan menyelamatkan lingkungan, karena tugas kita sebagai negara adalah menjaga kelangsungan negara ini bukan hanya untuk kita tetapi untuk anak cucu kita di masa yang akan datang.

Dipersilakan Bapak Gubernur.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Terima kasih Pimpinan.

Apa yang Pimpinan sampaikan tadi sepenuhnya kami sangat mendukung, baik tujuan jangka pendek maupun panjangnya. Panjang kita Pansus tetap tapi dalam hal Pansus ini Pak, kami minta nanti libatkan juga Komisi yang menangani pertambangan sekaligus BUMN Pak. Karena alasan yang utama selalu dikatakan keuntungan untuk negara, keuntungan negara. Jadi kita sulit kalau ketika sudah membawa nama negara cuma rugi juga ya susah juga kita. Untuk jangka pendek perlu kami sampaikan disini, tadi kami melihat slide yang disampaikan oleh Bapak Dirjen Gakkum Pak Roy, bahwa disitu ada kewenangan daripada Gubernur dalam hal mengambil tindakan khususnya pada saat pemutusan Amdal.

Kami mungkin dalam waktu dekat saya mohon maaf sekali, mungkin karena kemampuan daripada staf kami yang dalam membaca aturan-aturan ini agak lemah, kami mohon kesediaan Bapak Dirjen nanti meng-advise kami Bapak Dirjen. Kalau misal Bapak Dirjen sudah kencang apalagi saya Pak, akan sangat kencang. Tadi saya susah sampaikan Pak, ketika kami melakukan hal yang berkenaan dengan penertiban, Wagub kami saja disandera, Pol PP kami pun jadi tersangka, inikan suatu preseden yang buruk bagi kami, sehingga ini juga akan mengganggu kewibawaan kami. Tetapi kalau misalnya ini sudah didukung oleh para Anggota DPR RI dan Pusat,

kewenangan yang tadinya mungkin 50% tapi kalau ditambah energy dan *booster* yang lebih besar saya rasa hal ini bisa cepat kita laksanakan. Dan dalam tempo waktu yang sangat segera, ketika *advice* dari pada Dirjen Gakkum kepada kami apa yang bisa kami lakukan dan ditambah lagi hasil dari pada rapat kita hari ini, ini akan menguatkan kami untuk melakukan tindakan tegas kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran di daerah kami.

Dan kepada Bapak Dirjen Pengawasan, mungkin ada kekeliruan tadi Pak, tolong diinikan. Kita tidak bisa Pak, ijin lokasi perairan itu tidak ada untuk pertambangan. Jadi jangan nanti kita masuk salah, saya rasa yang paling kuat itu adalah dari Dirjen Gakkum disini. Tapi dukungan dari pada Kementerian Kelautan juga sangat kami tunggu.

Sekian dari saya Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Silakan Bupati Bangka.

WAKIL BUPATI BANGKA:

Baik, terima kasih Pak untuk yang kedua kalinya.

Bahwa terkait cerita panjang dari awal hingga sekarang kita sudah mendengarkan semua opini maupun pendapat terkait dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka. Maka kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka sangat mendukung jika memang akan dilaksanakan Pansus apakah Panja itu mekanismenya nanti tentu kembali kepada Anggota DPR RI yang terhormat untuk supaya tujuan kita yang terpenting bagaimana sekarang masyarakat Bangka yang telah lama menunggu dan ingin merasakan kebebasan dan kemerdekaan untuk mendapatkan haknya juga untuk menjalankan kehidupan disana itu terpenuhi dan juga tetap kita tidak memandang sebelah mata tentang kepentingan-kepentingan negara dan Pemerintah yang ada disana dalam rangka menjalankan kehidupan kita bernegara secara utuh. Mungkin itu Pak, supaya lebih tajam lagi nanti lebih gregetnya lagi kalau sudah Panja yang turun supaya solusi yang kita hasilkan nanti benar-benar solutif.

Mungkin itu Pak, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini ada yang penting yang sudah diucapkan, semuanya berjalan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan negara. Pertanyaan saya negara itu siapa? Negara itu kan untuk kepentingan rakyat, dana APBN kan untuk kepentingan rakyat, pendapatan ini, APBD untuk kepentingan rakyat. Nah, pertanyaannya adalah rakyat yang disananya sengsara, terus negaranya buat siapa. Ngapain juga kan nggak bisa ini terus-terusan dilakukan faktanya bahwa kepentingan negara menjadi ilusif, kesengsaraan rakyat adalah fakta, sehingga kita akan berangkat dari fakta. Faktanya adalah warganya kehilangan mata pencaharian, lingkungannya tercemar, kemudian dalam jangka panjang nggak ada kita bisa *recovery* kerusakan itu susah. Siapa sih yang bisa bikin terumbu karang, kalau bisa bikin juga mahal biayanya, waktunya lama. Siapa sih yang bisa bikin ikan, kan nggak bisa juga, uang bisa dicetak Pak, tapi kalau ikan itu tidak bisa lagi diciptakan dalam lingkungan yang sudah tercemar.

Selanjutnya Pak Bupati Bangka Barat. Silakan. Sudah cukup? Bapak Dirjen PPRL nanti terakhir Dirjen Gakkum.

PLT. DIRJEN PRL KKP:

Baik, terima kasih Pimpinan.

Ibu dan Bapak sekalian.

Saya juga tidak akan panjang Pak, tetapi intinya kami atas nama KKP pasti akan mendukung segala upaya yang sudah diputuskan hari ini. Secara politik mungkin Komisi IV DPR RI, kemudian kami di Kementerian KKP secara teknis akan membantu teman-teman terutama Dirjen Gakkum, Pemda dalam hal Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Kami punya divisi untuk kalau umpama kelapangan kami punya kapal dan seterusnya, jika memang itu diperlukan. Kami juga punya penyidik, kami juga punya tim yang dilapangan bisa mendukung kegiatan ini, intinya demikian. Dan kalau tadi ada yang khilaf mohon maaf Bapak Gubernur, nanti kita akan cermati lagi.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Bapak Dirjen Gakkum itu ada dua Pak, disitu. Pertama adalah Bapak itu adalah putra Bangka Belitung, artinya Bapak punya kewajiban moral secara genetik untuk menyelamatkan pulau Bapak. Yang kedua Bapak adalah penegak hukum. Dan yang ketiga, Bapak itu ganteng.

Terima kasih.

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Terima kasih Bapak Pimpinan dan juga seluruh Anggota Komisi IV DPR RI.

Apa yang Bapak Pimpinan sampaikan sebelumnya kepada kami, menindaklanjuti hasil Kunker Spesifik kita, bahwa kami terus melakukan upaya-upaya untuk penegakan hukumnya. Tim kami dengan tim Pak Dirjen KKP sudah dilapangan Pak, sedang mempelajari semua langkah-langkah ini.

Yang kedua, berkaitan dengan kasus PT. BAA Pak, kami sedang melakukan proses penyidikan dan juga kami akan lakukan langkah-langkah hukum lainnya. Disini juga hadir Direktur kami Pak Ragil Direktur Penyelesaian Sengketa, beliau biasa menggugat perusahaan Pak, dan kami sedang menyiapkan langkah-langkah itu Pak, dan para penyidik kami juga hadir disini. Jadi kami akan terus melakukan itu.

Untuk yang terhormat Bapak Gubernur, kami akan mendukung Bapak. Saya hari ini berbahagia Pak, sebagai orang Bangka Belitung Pak, tapi juga sebagai Dirjen Gakkum Pak. Kami akan mendukung Bapak Gubernur menggunakan kewenangan Bapak Gubernur untuk melakukan pengawasan termasuk juga penegakkan hukumnya Pak, kami akan 100% dukung Bapak karena kami sudah tawarkan juga sebelumnya kepada staf-staf Bapak. Hari ini yang penting bagi kita untuk melakukan upaya penegakkan hukum khususnya berkaitan di Kepulauan Bangka Belitung, walaupun kami melakukan tidak hanya di Bangka Belitung, kami melakukan di seluruh Indonesia. Tapi karena hari ini kita rapat dengan Bangka Belitung kami akan mendukung untuk Bapak Gubernur untuk melakukan langkah-langkah hukum berkaitan dengan kegiatan pertambangan maupun kegiatan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ada di Bangka Belitung Pak.

Terima kasih Bapak Dedi, sekali lagi terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini putra Bangka Belitung harus bersatu menyelamatkan kampung halamannya.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Sedikit Bapak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak Putra Aceh mau dukung perjuangan rakyat Belitung.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Benar, karena sebenarnya permasalahan yang terjadi di Bangka Belitung juga banyak terjadi di Provinsi lain. Inikan hanya sample hari ini, maka selama ini ada *something* atau ada *miscommunication* di antara kita nasional dengan daerah, misalnya seperti yang tadi. Saya ingin tadi jujur Bapak Gubernur menyampaikan mungkin ada telaah staf dari kami yang terbatas sehingga perlu dukungan. Buktinya bahwa ini ada komunikasi yang tidak terbangun dengan baik, sehingga kondisinya seperti itu.

Jadi saya ingin kasus Bangka Belitung ini menjadi *pilot project* penyelesaian masalah. Apalagi ini Bapak Gakkum Bangka Belitung, saya baru tadi Pak, saya pikir orang Aceh karena ganteng, biasanya yang ganteng-ganteng orang Aceh. Iya, kami dekat Arab. Oke. Jadi karena kembali saya ulang Bapak Dedi tadi mengatakan, Pimpinan kami mengatakan kondisi Bangka Belitung ini gila. Rakyat sengsara, tanah lingkungan rusak, perusahaan rugi, inikan gila ini. Kenapa bisa terjadi ini? Karena kita zolim kepada lingkungan, karena kita zolim kepada rakyat, maka keberkahan Allah dicabut. Maka saya minta kita memang bukan utusan untuk menegakkan, bukan tangan-tangan untuk menegakkan....

KETUA RAPAT:

Sebentar dulu Pak, yang rugi itu perusahaannya Pak.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Perusahaan rugi, rakyat juga rugi.

KETUA RAPAT:

Saya tegaskan sekali lagi Pak, yang rugi itu perusahaannya Pak, yang rugi perusahaannya Pak.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Iyalah perusahaan rugi, lingkungan rusak, alam hancur, kesimpulan kan kita semua rugi. Yang untung siapa? Ada orang gila yang untung disini. Makanya tugas Pak Roy, tugas kita semua, ini harus kita cari yang gila biar selesai masalah. Kalau nggak Pak, mohon maaf kita juga kemarin ke Kalimantan kita juga setelah rapat nggak focus, akhirnya kan tidak ada solusinya. Saya berharap ini di Bangka Belitung menjadi *pilot project* menyelesaikan masalah.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kenapa? Oh iya, siap Pak. Kalau saya urusan-urusan penyelamatan lingkungan saya akan paling depan Pak, karena ini tugas saya.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sedikit Pak Ketua, bisa Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ini dari Aceh juga, silakan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Begitu Pak Ketua, kalau sudah banyak orang gila kita jangan ikut gila itu saja cuman Ketua. Maksud saya begini Ketua, menyangkut apa yang dikatakan Pak Gubernur panggil BUMN. Saya kira Ketua, kalau bukan masalah tidak setuju dan setujunya, lebih bagus kita focus ke Panja. Sebab memanggil Komisi yang bersangkutan di Undang-Undang MD3 bisa Ketua. Kalau kita melalui Pansus cuman inipun tidak salah Ketua sama yang Ketua arahkan, nanti lambat Ketua mempunyai proses. Kalau kita Panja kapan itu Komisi VII DPR RI, Komisi VI DPR RI, yang kita panggil kan ada boleh Ketua kalau untuk kepentingan negara. Saya kira focus kita ke Panja tidak salah Pansus juga, cuman ini nanti panjang Ketua. Saya setuju yang dibilang Bapak Khalid tadi Ketua, harus ada *action* terus, kalau tidak nanti banyak jadi orang gila Ketua, kita juga jadi gila.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Panja, Pansus adalah hal teknis secara setelah ini, tetapi yang terpenting hari ini adalah apa langkah kita dalam minggu ini dan apa langkah kita dalam minggu depan, dan apa langkah kita di akhir Desember untuk menyelamatkan priuk nasi para nelayan di Kepulauan Bangka. Saya kalau bicara persoalan itu kita hari ini masih bisa makan disini, kita hari ini dapat honor, kita perjalanan dinas ditanggung negara, tetapi para nelayan untuk makan pun mereka tidak punya. Mungkin anak-anak mereka ke depan semakin sulit hidupnya, artinya kita ngingatkan bolehlah pasti kita berbenturan dengan berbagai pihak tetapi menurut saya semangat kita bela rakyat jauh lebih mulia dibanding apapun. Aturan boleh menghalangi kita, tetapi solusi selalu ada kalau kita punya niat yang baik untuk menyelamatkan mereka.

Prinsip Komisi IV DPR RI tidak akan berhadapan dengan PT. Timah, tidak akan berhadapan dengan Komisi-Komisi lain, tidak akan berhadapan

dengan BUMN, tugas kita cuman satu kita ingin para nelayan kembali berlayar mencari ikan pada laut yang menjadi hak mereka. Mereka lahir disitu berarti Allah sudah memberikan tempat itu untuk mereka yang prioritas bukan orang lain. Ini yang harus kita lakukan secara bersama. Jadi kalau argumentasi logis, yuridis maupun argumentasi logis sosiologis kita katakan kita tidak ngurus PT. Timah mau rugi atau tidak, yang kita urus cuman satu rakyat harus bisa kembali berlayar mencari ikan. Setuju tidak itukan? Jadi focus kita adalah itu. Andaikata pun mereka mencari ikan ada yang menghalangi maka harus menyingkir karena itu adalah laut mereka. Dan laut itu ditakdirkan untuk diambil ikannya sebenarnya bukan diambil karangnya.

Nah, yang pertama kita masuk kesimpulan, kita biar jam 13.00 WIB sudah selesai, biar Pak Gubernur bisa kembali segera ke Bangka untuk membuat penanggulangan penahan bagi 6 warga yang sudah ditahan hari ini.

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk melakukan penghentian kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan Pulau Bangka, terutama Perairan Air Kantung, Perairan Pantai Matras, Perairan Pantai Muntok, dan perairan lainnya yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk dan mitra kerjanya serta perusahaan lainnya, yang terbukti berdampak pada kerusakan lingkungan ekosistem perairan dan merugikan masyarakat/nelayan sekitar, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setuju nggak ini?

Pemerintah, Gubernur, Bapak Dirjen setuju?

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Secara narasi agak beda kali Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan betulkan narasinya.

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Jadi misalnya Perairan Muntok, perairan yang dilakukan oleh mitra kerja PT. Timah. Inikan tidak hanya mitra Pak, PT. Timah sendiri kan.

KETUA RAPAT:

Silakan diperbaiki kalimatnya.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua, mungkin saya nanya dulu, ini yang mengeluarkan ijin Pemerintah Daerah atau Pusat, kalau Pusat yang menghentikan ya Pusat, ini tolong di Pak Gubernur. Ini ijinnya ini dari mana, kalau Bapak Gubernur ya wajar ya tapi kalau Pusat ya tidak bisa Pak Gubernur menghentikan ijin dari Menteri.

Terima kasih.

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Pak Darori boleh ijin Pak Darori, kalau ijin lingkungannya dikeluarkan oleh Gubernur Pak. Tadikan ada ijin lingkungan dan ijin tambang Pak, jadi dengan atas nama ijin lingkungan kan kalau Undang-Undang Lingkungan kan bisa menghentikan kegiatan.

Inikan menghentikan bukan mencabut ijin kan, kan bisa dalam sanksi administratif itu ada namanya paksaan Pemerintah, ada teguran tertulis paksaan Pemerintah, paksaan Pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian termasuk didalamnya kalau memang berdampak sangat serius bisa dihentikan. Kemudian ada pencabutan dan juga pembukaan dan pencabutan. Pak Dedi sudah pernah ya kita melakukan Kunker bareng, kami melakukan menghentikan kegiatan dengan Bapak Dedi.

KETUA RAPAT:

Silakan, inikan dari sisi lingkungan Bapak Gubernur itu bisa memberikan rekomendasi kepada Dirjen Gakkum untuk melakukan penindakan dan penghentian.

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Yang mengeluarkan siapa kan kontariatius istilahnya Pak, bahwa siapa yang mengeluarkan ijin berwenang untuk melakukan penindakan dari pada ijin itu.

KETUA RAPAT:

Kita bersama-sama sama saja Pak, kita saling bertanggung jawab komitmen untuk rakyat kita bersama-sama jangan lempar tanggung jawab.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Bukan Ketua, saya hanya mengingatkan jangan sampai inikan ada dua ijin, satu ijin lingkungan dan satu ijin operasional. Jangan sampai nanti Gubernur di-TUN. ini perlu dipelajari betul siapa berhak itu. Kalau lingkungan okelah ya tapi operasional tambangnya yang mengeluarkan selama ini siapa. Itu yang perlu kita dalam jangan sampai kita niatnya baik malah Bapak Gubernur babak belur di Pra TUN.

Terima kasih Ketua.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Kalau Gubernur lingkungan, kalau ijin Pusat. Sebenarnya kalimat ini mendorong Pemerintah Pusat cq. Perikanan, cq. Kehutanan, Gubernur, ini sebuah rangkuman saya pikir. Sedangkan *action*-nya sesuai dengan kewenangan masing-masing saya pikir.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Setuju ini?

Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kan ini semuanya juga sesuai peraturan kalimatnya kan.
Setuju nggak? Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bupati Bangka, dan Bupati Bangka Barat untuk saling berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pembangunan *break water* dan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan berupa sedimentasi pasir laut di Muara Air Kantung dan Perairan Muntok akibat kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) penambangan timah di Pantai Sungai Liat, Kabupaten

Bangka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setuju? Pemerintah setuju?

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian izin lokasi terutama di Perairan Matras di Kabupaten Bangka yang merupakan daerah pariwisata dan Perairan Pantai Muntok di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah perairan budi daya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua, itu di Matras itu ada Perda-nya kabupaten diijinkan disitu tambang. Perdanya tolong ditinjau kembali gitu.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

12 mill oleh Gubernur sekarang Pak.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Pak, untuk yang nomor 4 ini berlakunya 5 tahun Pak. Terus Pak, di Undang-Undang Pertambangan yang baru Pasal 17B Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk tidak merubah tata ruang yang sudah ada IUP tambang khususnya. Itu harus diperjuangkan juga Pak, dan itu saya pernah yudisial review untuk itu tapi ditolak.

KETUA RAPAT:

Jadi keberatan atas yang 4 apa?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua, ini saya bacakan tuntutan masyarakat ya di Matras. Mendesak DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk meninjau kembali Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Zonasi karena cacat prosedur dan cacat hukum. Ini tuntutan masyarakat Pak, yang cacatnya dimana Pak Gubernur ini saya tidak tahu. Ini kenapa dikatakan gitu oleh masyarakat dianggap cacat.

GUBERNUR BANGKA BELITUNG:

Karena permintaan masyarakat disitu untuk tidak ada tambang, sama dengan kami juga tidak mau Pak. Tetapi di dalam langkah penyusunan RZWP3K itu pada langkah ke-32 ada dengar pendapat dengan semua seluruh *stake holder* sebelum ditetapkan termasuk disitu Kementerian Kelautan, Kementerian ESDM, Kementerian terkaitlah termasuk KPK pun ada disitu untuk mengawasi.

Nah, disitu disepakatilah bersama-sama akhirnya IUP yang di 2 mill itu di bawah 2 mill masih tetap sampai dengan 2025. Tetapi masalahnya di Undang-Undang Pertambangan yang baru Pasal 17 Ayat (2) B tadi menyatakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak harus menjamin apa yang sudah menjadi IUP yang sudah ada. Jadi akhirnya tahun 2025 itu nggak bisa juga dicabut.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Saya kira gini Pak Ketua, apa yang disampaikan Bapak Gubernur itu betul kronologinya tapi karena ini ada tuntutan mencabut Perda tolong dicantumkan. Soal jadi tidaknya kita lihat isinya nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi misalnya berbenturan dengan Undang-Undang terbaru gitu kan, itu hal lain. Yang penting dari sisi spirit kita sudah membuat bahwa spiritnya masyarakat Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Belitung sesungguhnya sudah tidak sepakat dengan penambangan pasir laut itu, karena memiliki efek negative bagi kehidupan masyarakat. Negative lingkungannya, negative sosialnya, negative ekonominya, termasuk negative kekayaan alamnya gitu. Dimasukkan saja.

Sebelum merevisi yang 4 kita perbaiki kalimatnya kita ke-5 dulu, bolehkan? Nanti kita yang ke-4 mundur lagi diperbaiki biar tidak waktu tertunda. Silakan diperbaiki.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi atas kinerja PT Timah Tbk terkait laporan keuangan yang menunjukkan kerugian perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut serta permasalahan lingkungan dan sosial dengan masyarakat/nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) mengenai kegiatan operasional penambangan timah di PT. Bangka Belitung.

Jadi Pansusnya adalah Pansus Kerusakan Lingkungan bukan operasional PT. Timah, karena kita komisinya kita adalah komisi lingkungan. Kalau kerusakannya disebabkan oleh PT. Timah itu merupakan dampak saja. Pansus Kerusakan Lingkungan.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Lebih tegas lagi Pak Ketua ijin, konflik sosial antar masyarakat Pak.

KETUA RAPAT:

Ya itu Pak, kerusakan sosial. Kerusakan sosial itu didalamnya ada konflik sosial antar masyarakat, kerusakan lingkungan itu Pak, itu masuk kerusakan lingkungan. Setuju nggak? Jadi itu kalimatnya dirubah saja ganti menjadi Pansus Kerusakan Lingkungan, kerusakan lingkungan dan sosial di Bangka Belitung.

Terima kasih.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Tinggal perbaiki kalimatnya.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Saran saya mengenai kerusakan lingkungan dan sosial penambangan timah di Bangka Belitung. Oh, sudah ada di atas, oke.

KETUA RAPAT:

Pansusnya bukan Pansus penambangannya, kerusakannya.
Baik, kemudian nomor 6.

6. Komisi IV DPR RI mendorong Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk dapat membebaskan 6 (enam) Ketua Rukun Tetangga (RT) Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka yang menjadi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen.

Bukan enam tapi tujuh sekarang, karena satu lagi PNS-nya sekarang tersangka hari ini. Jadi enak sudah ditahan, satu lagi tersangka.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua, inikan delik hukum sudah tersangka kalau membebaskan itu.

KETUA RAPAT:

Melakukan penangguhan penahanan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Nah, kalau membebaskan itu keputusan pengadilan.

KETUA RAPAT:

Melakukan penangguhan penahanan terhadap tujuh tersangka, yang enam sudah mengalami proses penjara. Sudahlah kalimatnya tinggal dirubah saja “melakukan penangguhan penahanan terhadap enam”, “untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap enam tersangka dan satu tidak ditahan”, kan ada tujuh.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Gubernur mau menjamin nggak untuk rakyatnya atau Bupati.

KETUA RAPAT:

Mau, siap.

Gubernur saya tegaskan ini di Komisi IV DPR RI, Gubernur Bangka Belitung akan menjadi penjamin terhadap penangguhan enam tersangka dan satu orang untuk dijamin tidak ditahan, *clear*. Ini Gubernur rakyat begini. Ya sudah nanti tinggal diberesin kalimatnya.

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah c.q. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa PT Bangka Asindo Asri terkait pencemaran lingkungan serta meminta Pemerintah Daerah untuk mendorong PT Bangka Asindo Asri untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Pengolahan Ubi Kasesa.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Tinggal yang 4 diperbaiki.

**DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:**

Mohon ijin Pak, coba yang tadi yang 6 ada salah mungkin. Ini bukan dokumen terkait gugatan perdata pidana bukan, jadi terjadi dengan gugatan *class action* atas dugaan pencemaran, karena masyarakat itu punya hak sebagai kelompok untuk menggugat. Dan mereka juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Pasal 66 tidak boleh dipidana perdata Pak, itu mereka dilindungi. Inikan kasusnya adalah namanya Anti-Slapp Pak, jadi *strategic lawsuit against public participation*.

KETUA RAPAT:

Ya, segera diperbaiki saja redaksionalnya. Oke, nomor 4 bagaimana redaksionalnya. Dan satu orang Pegawai Negeri Sipil yang tersangka untuk tidak dilakukan penahanan. Dan seluruh Rapat Kerja Bapak Gubernur ini ditonton langsung oleh rakyatnya di Bangka Belitung melalui live facebook TV Parlemen. Bapak itu tepuk tangan semua itu sudah jamin.

Yang keempat, nanti perbaiki kalimatnya.

4. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian izin lokasi terutama di Perairan Pantai Matras.

Menurut saya ijin lokasi di seluruh saja dievaluasi, setuju nggak? Di seluruh saja jangan terbatas Pantai Matras Pak, ijin lokasi pertambangan di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, kan kita sudah akan luas ini ngambilnya, evaluasi ijin lingkungan, paling terutama disitu.

4. Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan evaluasi terhadap pemberian izin lingkungan kegiatan penambangan timah di seluruh Kepulauan Bangka Belitung, terutama di Perairan Pantai Matras di Kabupaten Bangka yang merupakan daerah pariwisata dan Perairan Pantai Muntok di Kabupaten Bangka Barat yang merupakan daerah perairan budi daya. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan revisi Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ya sudah setuju ini? Oke.

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Berkat niat yang sama, tekad yang sama, semangat yang sama bahwa kita akan sama-sama akan melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Menjaga kelangsungan lingkungan pada hari ini kita sudah selesai melakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPR RI dengan Pemerintah cq. Gubernur, para Bupati, para Dirjen yang sudah melahirkan kesepakatan-kesepakatan bersama. Semoga kesepakatan ini menjadi spirit kita untuk melakukan perubahan-perubahan dan perubahan, perubahan yang menuju arah kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Sekali lagi saya katakan perubahannya menuju arah perbaikan dan kesejahteraan rakyat.

Dan selanjutnya dipersilakan ada yang disampaikan. Cukup? Selanjutnya rapat ini saya nyatakan ditutup. Setelah ini kita teknis tidak usah

di forum ini ngomong kapan kita kapan melakukan langkah bersama. Terima kasih.

Salam untuk seluruh warga Bangka Belitung, kami Komisi IV DPR RI akan senantiasa berjuang bersama seluruh rakyat untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan hidup warga Bangka Belitung, mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan sejahtera batinnya.

Terima kasih.

*Wallahu Muwafil Ila Aqwamith Thariq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Sampurasun.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Thomy
NIP.196508171988031002